

Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi.
Dr. Maman Hermawan, M.Sc.
Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.
Drs. Jaulim Sirait, M.Si.

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL

KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL



Diterbitkan oleh:

AMaFRaD  PRESS

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 (lacak)
Faksimile (021) 3513287
Email: amafradpress@gmail.com
Anggota IKAPI: 501/DKI/2015

ISBN 978-623-6464-73-1 (PDF)



9 786236 464731

ISBN 978-623-6464-72-4



9 786236 464724

AMaFRaD  PRESS

KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014
All Rights Reserved

KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL

Penyusun :

Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi.

Dr. Maman Hermawan, M.Sc.

Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.

Drs. Jaulim Sirait, M.Si.

AMaFRaD  PRESS

KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL

Penyusun : Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi.
Dr. Maman Hermawan, M.Sc.
Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.
Drs. Jaulim Sirait, M.Si.

Editor : Hery Choerudin, S.St.Pi., M.Si.
Dr. Heri Triyono, A.Pi, M.Kom
Dr. Maharini Yulisti, M.Si

Desainer Sampul : Tomi Aris, S.Kel, M.Han

Halaman : xii+86 hal

Edisi/Cetakan :
Cetakan Pertama, 2023

Diterbitkan oleh :

Amafrad Press

Gedung Mina Bahari III Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070 (Lacak),
Faksimile (021) 3513287
Email:amafradpress@gmail.com
Anggota IKAPI: 501/DKI/2015

p-ISBN : 978-623-6464-72-4
e-ISBN : 978-623-6464-73-1 (PDF)

Hak Penerbitan © AMAFRAD Press

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pendidikan Kewarganegaraan adalah landasan penting dalam pembentukan mahasiswa milenial yang sadar akan peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan pluralisme. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa dilatih untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mampu berpartisipasi dalam proses demokratis, dan berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial. Mereka adalah generasi yang akan membawa perubahan positif, dan pendidikan kewarganegaraan adalah alat yang mempersiapkan mereka untuk misi ini.

Dalam dunia yang semakin terhubung, mahasiswa milenial memiliki kesempatan untuk menjalani peran penting dalam mempromosikan keragaman, persatuan, dan perdamaian. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mereka untuk menghargai perbedaan, berkomunikasi secara efektif, dan menjalin kerjasama lintas budaya. Pendidikan kewarganegaraan adalah tonggak penting dalam membentuk mahasiswa milenial menjadi individu yang sadar, bertanggung jawab, dan berdaya tindak. Melalui pemahaman mendalam tentang kewarganegaraan, mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan yang positif dalam masyarakat, negara, dan dunia. Dalam buku "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL," kita akan menjelajahi peran penting pendidikan ini dalam membentuk masa depan yang lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2023
Direktur Politeknik AUP



Dra. Ani Leilani, M.Si.

KATA PENGANTAR

Pendidikan Kewarganegaraan adalah tonggak penting dalam perjalanan pembelajaran dan pengembangan diri seorang mahasiswa. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang betapa krusialnya pemahaman kewarganegaraan, hak, kewajiban, dan peran mahasiswa dalam masyarakat dan negara. Kami yakin bahwa dengan fondasi yang kokoh dalam kewarganegaraan, mahasiswa akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan warga negara yang berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Buku ini hadir sebagai panduan dan sumber inspirasi bagi para mahasiswa milenial, yang pada hakikatnya adalah generasi yang memiliki potensi untuk membentuk masa depan bangsa.

Dalam buku ini, kami akan mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, pluralisme, serta bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan pengetahuan ini dalam menjawab berbagai isu global yang kompleks. Kami juga akan memberikan panduan praktis, contoh kasus, dan inspirasi agar mahasiswa dapat berpartisipasi dalam proses demokratis, memengaruhi perubahan sosial, dan memajukan persatuan dalam keragaman.

Semoga buku ini menjadi kompas dalam perjalanan memahami dan menjalani peran mahasiswa sebagai warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan berdaya tindak. Selamat membaca, dan mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa kita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Heri Triyono, A.Pi, M.Kom, Dr. Maharini Yulisti, M.Si, Ir. Pujoyuwono Martosuyono, M.Si, Dr. Ir. Nyoman Suyasa, M.S., Dr. Joni D. Haryadi, M.Sc dan Nur Azmi Setyawidati, S.T., M.Sc., yang telah mengoreksi dan memberikan masukan kepada tim penulis agar buku ini menjadi lebih lengkap dan penyajian materinya lebih baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala BRSDMKP, Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc, Sekretaris BRSDMKP, Dr. Rudi Alek Wahyudi, S.Pi, M.Si,; Kapusdik KP, Dr. Bambang Suprakto, A.Pi., M.T.; Direktur Politeknik AUP, Dra. Ani Leilani, M.Si.; dan tim editor BRSDM serta semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penerbitan buku dimaksud

SINOPSIS

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar negara, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang aktif, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai esensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman ini, mahasiswa tidak hanya dapat mengenali landasan ideologis negara, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, untuk memiliki semangat kebangsaan yang kuat dan mampu menghadapi pengaruh globalisasi. Pendidikan Kewarganegaraan membantu mengkonsolidasikan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, berkontribusi dalam masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, aspek bela negara juga penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa diberi pemahaman tentang pentingnya pertahanan dan keamanan negara, serta bagaimana peran mereka dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Ini juga melibatkan pembelajaran mengenai tanggung jawab dalam situasi darurat.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
SINOPSIS	vii
BAB I PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL.....	1
1.1 Konsep Dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.....	1
1.2 Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).....	4
1.3 Sumber Historis, Sosiologis Dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia.....	8
1.4 Tantangan dan Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan	20
1.4.1 <i>Esensi dan Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan</i>	20
1.4.2 <i>Tantangan Global</i>	22
1.4.4 <i>Pentingnya integrasi</i>	25
1.4.5 <i>Hakikat konstitusi</i>	33
1.4.6 <i>Implementasi hak dan kewajiban warga negara</i>	36
BAB II URGENSI DAN ESENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MASA DEPAN.....	41
2.1.1 <i>Konsep Cinta Terhadap Tanah Air (Nasionalis)</i>	43
2.1.2 <i>Teori-teori tentang nasionalisme</i>	51
2.1.3 <i>Proses Penanaman Nasionalisme di Indonesia</i>	52
BAB III URGENSI DAN ESENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PENENTU PEMBANGUNAN KARAKTER DAN BANGSA	59
3.1 Urgensi Dan Konsep Identitas Nasional.....	59
3.2 Pentingnya Identitas Nasional	59
3.3 Sumber Historis, Sosiologis, Dan Politik Identitas Nasional Indonesia. 60	
3.3.1 <i>Bendera Negara Sang Merah Putih</i>	62
3.3.2 <i>Bahasa Negara Bahasa Indonesia</i>	63
3.3.3 <i>Lambang Negara Garuda Pancasila</i>	64

3.3.4	<i>Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</i>	65
3.3.5	<i>Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika</i>	66
3.3.6	<i>Dasar Falsafah Negara Pancasila</i>	66
3.3.7	<i>Konstitusi (Hukum Dasar) Negara UUD 1945</i>	67
3.3.8	<i>Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berkedaulatan Rakyat</i>	71
3.3.9	<i>Tantangan Idenititas Nasional Indonesia</i>	73
3.4	Urgensi dan Esensi Identitas Nasional Terhadap Perwujudan Bela Negara dan Rasa Nasionalisme	74
BAB IV PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI TOLOK UKUR PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA		
4.1	Konsep dan Pentingnya Integrasi Nasional.....	77
4.1.1	<i>Makna Integrasi nasional</i>	78
4.1.2	<i>Jenis Integrasi nasional</i>	79
4.1.3	<i>Urgensi Integrasi nasional</i>	82
4.1.4	<i>Integrasi versus disintegrasi</i>	83
4.2	Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Integrasi Nasional	84
4.2.1	<i>Sejarah Perkembangan Integrasi di Indonesia</i>	86
4.2.2	<i>Pengembangan Integrasi di Indonesia</i>	87
4.3	Dinamika Dan Tantangan Integrasi Nasional.....	88
4.3.1	<i>Tantangan Pembangunan Integrasi</i>	89
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGANEGARA DALAM DEMOKRASI		
6.1.	Konsep Dan Pentingnya Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warganegara.....	92
6.2.	Sumber Historis dan Sosiologis dan Politis Tentang Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Indonesia	93
6.3.	Tantangan dan Dinamika Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara	94
6.3.1.	Ketentuan Dasar Pendidikan Dan Kebudayaan Serta IPTEK	95
6.3.2.	Aturan Dasar Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Perekonomian Nasional	96
6.3.3.	Ketentuan dasar tentang Keamanan Negara dan usaha pertahanan ..	96
6.3.4.	Ketentuan dasar tentang kewajiban dan hak asasi manusia.....	97

6.4.	Pentingnya dan Esensi Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara	98
BAB VI DINAMIKA SEJARAH KONSTITUSIONAL, KULTURAL DAN SOSIAL POLITIK		
101		
6.1.	Pentingnya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	101
6.2.	Perlunya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	101
6.3.	Sumber Sosiologis, Historis Dan Politik Tentang Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia	103
6.3.1.	<i>Lembaga Penegakan Hukum</i>	103
6.3.2.	<i>Lembaga Peradilan Pajak</i>	104
6.4.	Tantangan dan Dinamika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.....	105
BAB VII WAWASAN NUSANTARA.....		
107		
7.1.	Pentingnya Wawasan Nusantara	107
7.1.1.	<i>Hakikat Wawasan Nusantara</i>	107
7.1.2.	<i>Kebudayaan Daerah Sebagai Kebudayaan Nasional</i>	108
7.2.	Pentingnya Wawasan Nusantara	109
7.3.	Sumber Sosiologis, Historis Dan Politik Wawasan Nusantara	109
7.4.	Tantangan Dan Dinamika Wawasan Nusantara.....	110
7.5.	Urgensi Dan Esensi Wawasan Nusantara	111
7.5.1.	<i>Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik</i>	112
7.5.2.	<i>Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi</i>	113
7.5.3.	<i>Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya</i>	114
7.5.4.	<i>Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan</i>	114
BAB VIII BELA NEGARA DAN KETAHANAN NASIONAL.....		
117		
8.1.	Pentingnya Bela Negara Dan Ketahanan Nasional	118
8.1.1.	<i>Wajah Ketahanan Nasional indonesia</i>	119
8.1.2.	<i>Dimensi dan ketahanan nasional berlapis</i>	120
8.2.	Pentingnya Bela Negara Dan Ketahanan Nasional	122
8.2.1.	<i>Pentingnya Ketahanan Nasional</i>	123
8.3.	Sumber Historis, Sosiologis dan Politis Bela Negara Dan Ketahanan Nasional.....	125

8.4. Perwujudan Ketahanan Nasional Untuk Bela Negara	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

1.1 Konsep Dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Menurut Jamilus et al. (2021), kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang terkait dengan warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan status tersebut. Konsep warga negara mencakup beberapa aspek, seperti identitas, kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial suatu negara. Identitas warga negara merujuk pada pengakuan dan pemahaman diri sebagai anggota suatu negara tertentu. Kewarganegaraan merujuk pada status hukum seseorang sebagai warga suatu negara. Kewarganegaraan bisa diperoleh melalui kelahiran (*ius soli*) atau keturunan (*ius sanguinis*) (Jaya, 2021). Hak dan kewajiban warga negara diatur oleh undang-undang dan konstitusi negara. Hak-hak warga negara biasanya mencakup hak atas kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan memilih dalam pemilihan umum, serta hak atas perlindungan hukum. Kewajiban warga negara meliputi kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, dan melaksanakan tugas militer (jika diwajibkan). Sebagai warga negara, seseorang memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat membantu membangun dan memperkuat kesatuan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial suatu negara merupakan salah satu aspek penting dari konsep warga negara. Partisipasi tersebut bisa berupa partisipasi dalam pemilihan umum, memperjuangkan hak-hak warga

negara, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial-politik yang terus berkembang, konsep warga negara juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Misalnya, munculnya konsep warga dunia (*global citizen*) yang mengacu pada individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu global dan berpartisipasi dalam upaya untuk memecahkan masalah global (Hidayat et al., 2020). Konsep ini menekankan pada pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar negara dan individu untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan (Hidayat et al., 2020).

Dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang baik dan benar, diharapkan generasi penerus bangsa Indonesia pada hakekatnya cerdas dan mampu melakukan perubahan masyarakat (Hasni et al., 2021). Salah satu bentuk partisipasi aktif yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah dengan mengupayakan kesatuan komunal atau persatuan dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan cara seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, mengambil bagian dalam kegiatan politik, membantu memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, serta dengan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur masyarakat. Dengan mengupayakan kesatuan komunal, warga negara dapat membantu membangun dan memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat, meningkatkan keberlangsungan dan stabilitas negara, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, sejahtera, dan damai bagi seluruh warga negara. Aspek sosial masyarakat Indonesia menjadi sangat penting dalam penguatan kapasitas masyarakat sebagai Negara berkembang (Syafar, 2017).

PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, yaitu

"pendidikan" dan "kewarganegaraan". Pendidikan merujuk pada proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan seseorang, sedangkan kewarganegaraan merujuk pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara. PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan adil. Dalam mata pelajaran ini, peserta didik akan belajar tentang konstitusi, sejarah, sistem pemerintahan, politik, hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi. Melalui PKn, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyikapi berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, PKn juga dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan demokratis. Menurut Sujana (2019), Indonesia berupaya untuk menciptakan bangsa yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta memiliki wawasan kebangsaan dan pengetahuan yang baik melalui pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebuah mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sebagai warga negara yang baik, tangguh, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. PKn memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Secara lebih khusus, PKn mempelajari konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, hak asasi manusia, pluralisme, persamaan gender, dan isu-isu global yang terkait dengan kewarganegaraan. PKn juga mengajarkan keterampilan sosial dan

kepemimpinan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah di Indonesia, dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa kewajiban terhadap bangsa dan negara, serta mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saat ini, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan sebagai program kurikuler dengan tujuan membentuk warga negara yang baik dan cerdas (Nurgiansah & Rachman, 2022).

1.2 Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diperlukan karena ada beberapa alasan penting sebagai berikut:

1. Membentuk Warga Negara yang baik: PKn membantu mengembangkan dan membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. PKn mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku yang baik dalam masyarakat.
2. Memahami Konstitusi Negara: PKn mengajarkan tentang konstitusi negara dan hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara. Hal ini membantu peserta didik memahami sistem pemerintahan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Memperkaya Budaya: PKn mengajarkan tentang keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia serta mempromosikan kebersamaan dan toleransi antara kelompok-kelompok budaya.
4. Menjaga Keamanan Nasional: PKn mengajarkan tentang pertahanan dan keamanan nasional serta mengembangkan kesadaran akan ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri yang dapat

membahayakan kedaulatan negara.

5. Menjalin Hubungan Internasional: PKn mengajarkan tentang hubungan internasional dan perdagangan luar negeri. Hal ini membantu peserta didik memahami pentingnya kerjasama internasional dan perdagangan luar negeri untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan semangat cinta tanah air dan rasa nasionalisme serta memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi para generasi muda sesuai dengan keadaan masyarakat (Septiano & Najicha, 2022; Fahmi et al., 2021). Generasi muda perlu diberikan ruang untuk mengekspresikan kemampuannya dalam masyarakat secara positif dengan aktif berorganisasi agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter positif dalam kehidupan bermasyarakat (Irayanti et al., 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting karena memiliki tujuan untuk mewujudkan kesadaran bela negara pada warga negara. Sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat mempunyai peran penting dalam suatu negara dengan membela negaranya (Khoeri, 2020); Nuryanti, 2020). Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat perlu mengembangkan kesadaran bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Holimin et al., 2021). Bela Negara dipandang mempunyai peran strategis bagi masyarakat khususnya generasi muda (Sangkanakala et al., 2020). Selain itu, PKn juga bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta membentuk karakter yang baik pada warga negara. Dalam konteks kesadaran bela negara, PKn memiliki

peran penting dalam membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Melalui PKn, warga negara diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sejarah perjuangan bangsa, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Selain itu, PKn juga membantu mengembangkan sikap kritis dan reflektif pada warga negara dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, PKn dapat membantu mewujudkan generasi muda yang memiliki pemikiran yang cerdas, kritis, dan siap berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah salah satu mata pelajaran yang harus diberikan pada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Menurut UU Sisdiknas, PKn memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Membentuk warga negara yang memiliki kesadaran, pemahaman, dan pengamalan terhadap nilai-nilai dasar demokrasi, hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan bangsa, serta cinta tanah air.
2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, kepedulian, serta partisipasi aktif warga negara dalam membangun bangsa dan negara.
3. Membentuk karakter bangsa yang berlandaskan moral dan etika yang luhur.
4. Meningkatkan kemampuan warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.
5. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan identitas nasional sebagai dasar keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, PKn diharapkan dapat memberikan

pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sejarah perjuangan bangsa, norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, serta cara-cara berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Selain itu, PKn juga diharapkan dapat membantu mengembangkan sikap kritis dan reflektif pada peserta didik dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang dipegang oleh negara Indonesia. Kelima asas Pancasila tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, seperti nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan agama, namun tidak memihak pada satu agama tertentu dan menghargai semua agama yang ada di Indonesia. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi moralitas. Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, namun tetap bersatu dan satu kesatuan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai konsensus. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

PKn di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar negara, serta nilai-nilai kewarganegaraan seperti persatuan, kerjasama, gotong royong, toleransi, dan demokrasi. PKn di perguruan tinggi juga bertujuan untuk membentuk karakter bangsa peserta didik dan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang ada. Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam undang-undang meliputi muatan nilai-nilai ideologi pancasila dan proses pendidikannya serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan tanggung jawab dan hak-hak sipil (Winataputra, 2014). Melalui pembelajaran tersebut, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Kurikulum PPKn juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa, serta berpartisipasi dalam memajukan negara Indonesia. Kehadiran kurikulum PKn merupakan upaya untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan sikap kewarganegaraan yang baik, sehingga mampu menjaga dan memajukan bangsa Indonesia ke depan.

1.3 Sumber Historis, Sosiologis Dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki sumber historis, sosiologis, dan politik yang dapat digali untuk memahami perkembangan dan peranannya dalam pembentukan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan

historis dapat digunakan untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berkembang sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dibatasi oleh pihak kolonial yang lebih menekankan pada pelajaran-pelajaran teknis dan administratif. Setelah kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diperkuat dengan diresmikannya Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dalam masyarakat, seperti beragamnya etnis, agama, budaya, dan bahasa. Hal ini memperkuat posisi pendidikan kewarganegaraan dalam memupuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan di antara warga negara Indonesia. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun kesadaran sosial di antara warga negara Indonesia.

Pendekatan politis dapat digunakan untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negara. Selama masa Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai sarana untuk mengokohkan ideologi negara dan membentuk kesadaran politik yang sesuai dengan pemerintah. Namun, setelah era reformasi, pendidikan kewarganegaraan mulai diberi perhatian lebih besar dalam konteks pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, yang tercermin dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang lebih menekankan pada pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam proses demokrasi di Indonesia.

1. Sumber historis

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berasal dari tradisi pendidikan nasionalis yang muncul pada awal abad ke-20. Pada masa itu, para

pemimpin nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno memandang bahwa pendidikan adalah sarana untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran kewarganegaraan yang tinggi dan mampu berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia. Selama masa penjajahan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dibatasi oleh pihak kolonial yang lebih menekankan pada pelajaran-pelajaran yang bersifat teknis dan administratif. Setelah kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diperkuat dengan diresmikannya Pancasila sebagai ideologi negara, serta UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini memperkuat posisi pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

2. Sumber sosiologis

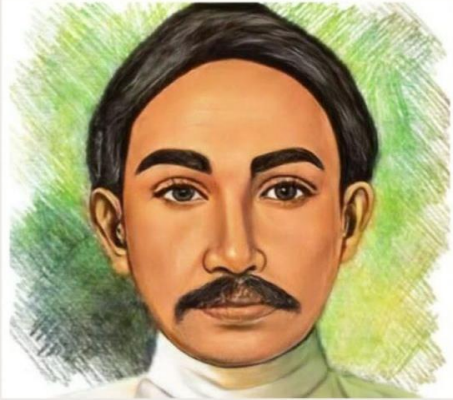
Pendidikan kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam baik dari segi etnis, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga bertujuan untuk memupuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan di antara warga negara Indonesia. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mencoba membangun kesadaran sosial di antara warga negara Indonesia, baik melalui nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, maupun melalui peningkatan kesadaran tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi.

3. Sumber politik

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negara. Sepanjang sejarah Indonesia, pendidikan kewarganegaraan selalu menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan bangsa. Selama masa Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai sarana untuk mengokohkan ideologi negara dan membentuk kesadaran politik yang sesuai dengan pemerintah. Berdirinya organisasi Boedi

Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peristiwa ini dianggap sebagai tonggak sejarah penting dalam gerakan nasional Indonesia yang kemudian mengarah pada perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Boedi Oetomo didirikan oleh sekelompok intelektual muda Jawa yang prihatin dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa itu. Mereka merasa bahwa pemerintahan kolonial Belanda tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia dan membatasi kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Boedi Oetomo bertujuan untuk memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, mengembangkan pendidikan dan kesenian, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Organisasi ini menjadi teladan bagi gerakan nasional lainnya yang kemudian muncul di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1928, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai penghargaan atas peran Boedi Oetomo dalam membangkitkan semangat perjuangan nasional dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

ORGANISASI BUDI UTOMO



**PENGGAGAS
DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**



**PENDIRI
DR. SOETOMO**

Gambar 1. Pendiri Boedi Oetomo

(Sumber: <https://kumparan.com/user-28032022031413/budi-utomo-sang-pelopop-pergerakan-nasional-1xnuUvD5vK9>)

Setelah berdirinya Boedi Oetomo, banyak organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain yang muncul di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

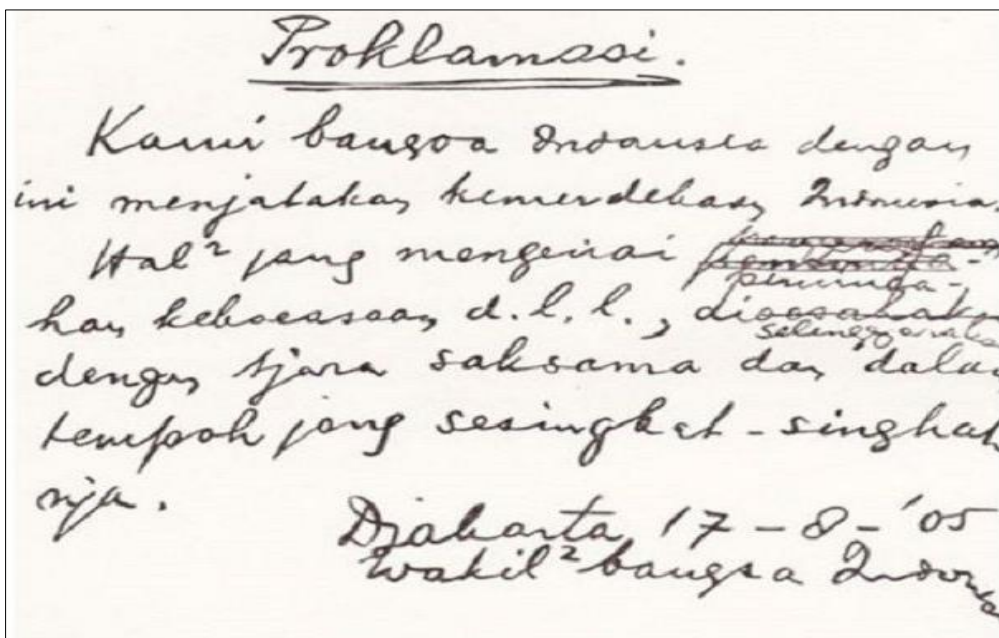
1. Sarekat Islam (SI): didirikan pada 1905 di Surabaya oleh Haji Samanhudi, organisasi ini awalnya bertujuan untuk melindungi hak-hak para buruh pabrik, kemudian berkembang menjadi gerakan sosial dan politik yang melawan penjajahan Belanda.
2. Partai Nasional Indonesia (PNI): didirikan pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno dan beberapa tokoh lainnya, PNI adalah partai politik pertama yang didirikan di Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

3. Partai Komunis Indonesia (PKI): didirikan pada 1920, PKI adalah partai politik yang beraliran kiri yang terkenal di Indonesia. PKI awalnya dibentuk sebagai wadah untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan buruh dan petani di Indonesia, kemudian berkembang menjadi sebuah partai politik yang memperjuangkan keadilan sosial dan kemerdekaan Indonesia.
4. Perserikatan Perjuangan (Perjuangan): didirikan pada 1926, Perjuangan adalah organisasi politik yang berusaha mempersatukan berbagai organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
5. Pemuda Indonesia: didirikan pada 28 Oktober 1928 oleh beberapa tokoh muda Indonesia, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai suku dan agama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Perjuangan dan pengorbanan para tokoh pergerakan inilah yang kemudian membuahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1930-an organisasi-organisasi kebangsaan tumbuh pesat di Indonesia, baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini terjadi karena semangat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan semakin membara di kalangan masyarakat Indonesia.

Pada saat itu, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Selain itu, muncul pula organisasi-organisasi seperti Perserikatan Perjuangan (Perjuangan), Persatuan Pergerakan (PP), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan berbagai organisasi lainnya. Selain organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa tokoh

pergerakan kebangsaan Indonesia yang berada di luar negeri, seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka memimpin gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia di luar negeri, terutama di Belanda dan Jepang.



Gambar 2. Naskah asli proklamasi kemerdekaan RI

(Sumber: <https://www.ayojakarta.com>)

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Agresi Militer Belanda: Tidak lama setelah Indonesia merdeka, Belanda mengirimkan pasukan militernya ke Indonesia dengan alasan merebut kembali wilayah jajahannya. Konflik ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I dan II. Konflik ini berlangsung selama

beberapa tahun dan memakan banyak korban jiwa.

2. Pemberontakan DI/TII: Pemberontakan DI/TII adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Pemberontakan ini berlangsung selama bertahun-tahun dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan.
3. Gerakan Separatis: Setelah merdeka, Indonesia menghadapi beberapa gerakan separatisme di beberapa daerah. Beberapa di antaranya adalah gerakan separatisme di Aceh dan Papua.
4. Masalah Ekonomi: Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang sangat serius. Ekonomi Indonesia yang masih sangat lemah dan masih tergantung pada ekonomi kolonial Belanda membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia setelah kemerdekaan memang sangat besar dan kompleks. Namun, dengan semangat perjuangan dan persatuan yang tinggi, bangsa Indonesia berhasil melewati semua tantangan tersebut dan terus berjuang untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah memang telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki masih belum selesai. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang membutuhkan usaha dan perjuangan yang terus menerus. Beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya antara lain adalah:

1. Ancaman Terorisme: Indonesia masih menghadapi ancaman terorisme yang bisa mengancam keamanan nasional. Berbagai kelompok teroris masih aktif melakukan aksi-aksi kekerasan di Indonesia.
2. Konflik Sosial dan Agama: Indonesia masih mengalami berbagai

konflik sosial dan agama yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa konflik tersebut antara lain konflik di Papua, konflik di Poso, konflik di Ambon, dan konflik di Kalimantan Tengah.

3. Masalah Ekonomi: Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, namun masih banyak masalah yang perlu diatasi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi.
4. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Ketergantungan pada sumber daya alam tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Untuk mempertahankan kemerdekaannya, Indonesia harus terus berjuang dan berusaha untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang ada. Selain itu, perlu juga dilakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan semangat perjuangan dan persatuan yang tinggi, bangsa Indonesia dapat terus mempertahankan kemerdekaannya dan meraih kemajuan yang lebih baik. Meskipun pada awal-awal kemerdekaan, upaya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara formal di sekolah-sekolah, namun sebenarnya sejak tahun 1946, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kurikulum dan program pendidikan yang mencakup pembelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Pada kurikulum tersebut, mata pelajaran kewarganegaraan diberikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, serta menumbuhkan

semangat nasionalisme dan patriotisme. Namun, pada saat itu, pelajaran kewarganegaraan masih terbatas dan tidak menyentuh semua aspek kehidupan bermasyarakat, seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan hak politik. Adapun terbitnya buku Civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia pada tahun 1951, dapat dianggap sebagai salah satu upaya pengembangan dan penyempurnaan pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia. Buku tersebut dikembangkan oleh Prof. Dr. Soepomo dan Prof. Dr. Kusnadi Hardjasoemantri, dan merupakan salah satu buku referensi dalam pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada awal-awal kemerdekaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara formal di sekolah-sekolah, namun upaya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1946 dan terus berkembang hingga saat ini.

Perubahan kurikulum pada tahun 1975 merupakan bentuk implementasi dari Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, selain membahas tentang Pancasila dan UUD 1945, juga dilakukan upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Pancasila, seperti gotong royong, kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun karakter bangsa yang kuat dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pengajaran PKN juga turut dipengaruhi oleh kebijakan politik Orde Baru pada era tahun 1970-1990-an yang lebih menekankan pada aspek keamanan dan kestabilan nasional, serta penanaman sikap nasionalisme dan cinta tanah air bagi generasi muda. Nasionalisme merupakan paham atau perasaan mendalam yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi seseorang harus ditujukan bagi negara dan bangsanya (Armawi, 2019). Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 pada saat

itu dipisahkan dari mata pelajaran PKn dan berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). PMP menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, PMP juga mengajarkan etika dan moral yang baik bagi generasi muda, sehingga diharapkan dapat membentuk karakter dan kepribadian yang kuat dan berintegritas.



Gambar 3. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto (1966-1998)

(Sumber: <https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-orde-baru>)

Pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran moral dan kebangsaan yang tinggi serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PMP diberikan di

semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Isi materi PMP meliputi penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara, kebhinekaan, toleransi antarumat beragama, dan budi pekerti yang baik. Nama mata pelajaran PMP kemudian diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada tahun 1994. Perubahan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pendidikan di Indonesia harus memberikan pengajaran tentang Pancasila dan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran PPKn memiliki tujuan yang sama dengan PMP, yaitu untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran moral dan kebangsaan yang tinggi serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, PPKn memiliki pendekatan yang lebih terbuka dan kritis, sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk berpikir mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Isi materi PPKn meliputi pengenalan tentang Pancasila dan UUD 1945, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, HAM, dan pluralisme. PPKn juga mengajarkan tentang nilai-nilai universal seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, serta mengembangkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan kebhinekaan. Setelah era Orde Baru berakhir, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengalami beberapa kali perubahan. Dokumen mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) diterbitkan pada tahun 2006, kemudian nama mata pelajaran tersebut diubah menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) pada tahun 2013. Perubahan nama ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pembentukan karakter peserta didik yang mencakup aspek moral, agama, dan sosial, serta penguatan pengajaran tentang Pancasila dan kewarganegaraan.

1.4 Tantangan dan Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan

1.4.1 Esensi dan Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan

Esensi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran moral dan kebangsaan yang tinggi serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan peserta didik yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai keberagaman budaya dan agama, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik di masyarakat. Eksistensi pendidikan kewarganegaraan terletak pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengenali, memahami, dan menghargai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik juga diajarkan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang positif terhadap perbedaan dan kebhinekaan, sehingga mampu berinteraksi secara baik dengan masyarakat yang beragam. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran kritis dan mandiri peserta didik terhadap berbagai isu sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan di segala bidang kehidupan, termasuk perilaku warga negara khususnya mahasiswa. Warga negara harus mendorong warga negara untuk mendapatkan manfaat dari efek positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membangun negara bangsa (Kementerian Riset, 2016).

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pendidikan kewarganegaraan juga harus mengembangkan diri untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi aktif dalam kancah global dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur secara umum tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Namun sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan, telah terlebih dahulu dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 dan No. 45/U/2002 tentang kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa didik dalam dunia kerja atau kehidupan masyarakat. Dalam kurikulum ini, tidak hanya dituntut kemampuan akademik saja, tetapi juga kemampuan non-akademik seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis.

Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian mahasiswa didik dalam kurikulum KBK. Mata kuliah pengembangan kepribadian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa didik dalam hal sikap, moral, etika, kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan lain yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat lebih mempersiapkan mahasiswa didik untuk menghadapi tantangan di masa depan dan dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Kompetensi dasar atau kompetensi minimal adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh

peserta didik setelah mengikuti suatu program pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini biasanya dijabarkan dalam kurikulum dan menjadi acuan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.

Terdapat tiga jenis kompetensi dasar atau kompetensi minimal yang biasanya dijadikan acuan dalam kurikulum pendidikan, yaitu:

1. **Kompetensi Inti:** merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, terdiri dari empat aspek, yaitu: (1) pengetahuan, (2) keterampilan, (3) sikap, dan (4) nilai. Kompetensi inti ini meliputi kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, serta memiliki etika dan moral yang baik.
2. **Kompetensi Dasar Mata Pelajaran:** merupakan kemampuan khusus yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini menjelaskan apa yang harus dipelajari dan dicapai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tersebut.
3. **Kompetensi Lulusan:** merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Kompetensi lulusan ini merujuk pada kemampuan umum yang harus dimiliki oleh lulusan, seperti kemampuan beradaptasi, memecahkan masalah, dan bekerja secara mandiri maupun dalam tim.

1.4.2 Tantangan Global

Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi di seluruh dunia (Kokotiasa, 2021). Proses integrasi ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau. Dalam proses globalisasi, pasar menjadi salah satu aspek yang penting. Ekspansi pasar global membawa dampak yang

signifikan bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, globalisasi membawa kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, di sisi lain, globalisasi juga membawa implikasi sosial dan lingkungan yang serius, seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, dalam menghadapi proses globalisasi, diperlukan upaya untuk mengelola dampak-dampak negatifnya dan memperkuat dampak-dampak positifnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap mental cerdas dan penuh tanggung jawab dari mahasiswa didik dalam memahami dan menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara dengan rasional, konsisten, dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk menguasai iptek sehingga dapat menemukan jati diri dan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanusiaan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa didik akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi, serta mampu memahami dan menghargai perbedaan dan keragaman budaya, agama, dan pandangan politik yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa didik juga diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mengembangkan keterampilan kritis dan reflektif, kebebasan berpikir, masalah sosial dan

mampu mengembangkan keterampilan berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politis (Maftuh, 2018). Dengan demikian, mahasiswa akan menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mengemas dan mengisi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di perguruan tinggi, langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyusun profil lulusan yang diinginkan: Perguruan tinggi harus menentukan profil lulusan yang diinginkan, yaitu kualifikasi, kemampuan, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusannya. Profil lulusan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
2. Menyusun matriks kompetensi: Matriks kompetensi adalah daftar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai dengan profil lulusan yang telah ditentukan. Matriks kompetensi harus disusun secara terperinci dan mengacu pada standar kompetensi yang berlaku.
3. Mengembangkan kurikulum: Kurikulum yang dibuat harus disusun berdasarkan matriks kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum harus mencakup semua kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai profil lulusan yang diinginkan.
4. Menentukan metode pembelajaran: Metode pembelajaran yang dipilih harus mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk berlatih dan memperoleh pengalaman secara langsung.
5. Mengembangkan penilaian kompetensi: Penilaian kompetensi harus disusun untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi oleh mahasiswa

- didik. Penilaian harus mencakup seluruh kompetensi yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran.
6. Menyusun program pengembangan dosen: Perguruan tinggi harus menyediakan program pengembangan dosen untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan membantu dosen dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih baik.
 7. Melakukan evaluasi dan perbaikan: Kurikulum berbasis kompetensi harus dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi mahasiswa didik.

1.4.4 Pentingnya integrasi

Integrasi memiliki banyak arti dan makna tergantung pada konteksnya, namun secara umum, integrasi merujuk pada proses atau upaya untuk menyatukan atau menggabungkan beberapa elemen, komponen, atau sistem menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Integrasi memiliki banyak nilai penting, di antaranya:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas: Integrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem atau proses dengan menghilangkan duplikasi, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi biaya.
2. Meningkatkan keterkaitan: Integrasi juga dapat meningkatkan keterkaitan dan kohesi antara berbagai elemen atau unit dalam suatu sistem atau organisasi, sehingga memudahkan koordinasi dan sinergi antara berbagai bagian.
3. Meningkatkan kualitas: Integrasi juga dapat meningkatkan kualitas suatu sistem atau proses dengan menyatukan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

4. Meningkatkan inovasi: Integrasi juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan menyatukan berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda-beda.
5. Meningkatkan responsif: Integrasi juga dapat meningkatkan responsif suatu sistem atau organisasi terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, integrasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan sosial. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Watuwaya, 2021). Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dalam hal suku, agama, budaya, bahasa, maupun geografis. Integrasi nasional diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai perbedaan tersebut tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memastikan bahwa semua warga negara Indonesia merasa sebagai bagian dari bangsa yang sama. Integrasi nasional dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan, mendorong inklusifitas dan toleransi terhadap perbedaan, menghargai keanekaragaman budaya dan bahasa daerah, serta memperkuat kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya integrasi nasional di Indonesia adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dengan menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada, maka Indonesia dapat menjadi negara yang lebih

kuat, solid, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Integrasi nasional juga terjadi sebagai pembentukan kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh tujuan bersama, baik ideologis, ekonomi maupun sosial (Irianto, 2013).



Gambar 4. Integrasi nasional menyatukan bermacam-macam agama
(Sumber: <https://www.kompasbelajar.com/2021>)

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Integrasi sosial yang baik dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memajukan pembangunan nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari suatu negara, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik juga menghargai keanekaragaman yang ada dalam masyarakatnya, termasuk perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Integrasi sosial dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti pendidikan yang inklusif dan berbasis kebhinekaan, promosi dialog antarsuku dan antarbudaya, serta dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan memperkuat sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga

negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak suku, agama, budaya, dan bahasa, memerlukan integrasi sosial yang kuat untuk memastikan keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan masyarakat yang terintegrasi dengan baik, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat di tingkat global. Era reformasi tahun 1998 adalah periode yang sulit bagi Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Banyaknya perbedaan suku, budaya, agama, dan kepentingan pribadi menyebabkan munculnya konflik horizontal, seperti konflik antarsuku, konflik agama, dan konflik antar partai politik. Namun, meskipun mengalami tantangan yang besar, Indonesia tetap berhasil mencapai beberapa tujuannya pada era reformasi tersebut, seperti berhasil memperkuat sistem demokrasi, mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dan hak asasi manusia.

Untuk mencapai tujuan yang lebih besar, Indonesia perlu memperkuat integrasi sosial dengan mempromosikan kesadaran bahwa seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara untuk memperkuat integrasi sosial adalah dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi antarsuku, agama, dan budaya, serta dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Selain itu, penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang merata dan memperbaiki kualitas pendidikan serta kesehatan di seluruh daerah Indonesia. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang sangat kaya dan beragam. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan lebih dari

300 suku yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini membuat Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar dari segi kebudayaan, seni, dan tradisi. Suku-suku di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam hal bahasa, adat-istiadat, pakaian adat, seni, dan budaya. Selain itu, agama di Indonesia juga sangat beragam, dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keanekaragaman suku, budaya, dan agama ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dengan memiliki keanekaragaman yang kaya, Indonesia dapat memperkaya bahan inspirasi dan ide-ide baru dalam bidang seni, budaya, dan inovasi teknologi. Namun, keanekaragaman juga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam membangun integrasi nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme yang berbasis keberagaman, sehingga setiap warga negara dapat memahami dan menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama. Dengan demikian, keanekaragaman Indonesia dapat menjadi kekuatan yang positif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.



Gambar 5. Keanekaragaman suku, budaya dan agama di Indonesia.

(Sumber: <https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/rekaardiyana/contoh-keragaman-suku-bangsa-dan-budaya-di-indonesia>)

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah semangat bagi bangsa Indonesia dalam mempersatukan beragam suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Multikulturalisme adalah anugerah dari Tuhan, namun Bhineka Tunggal Ika adalah anugerah dari nenek moyang kita yang harus di jaga dan diselamatkan (Lestari, 2015).Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk namun menjunjung tinggi persatuan (Pursika, 2009). Semboyan ini terdapat dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu". Upaya integrasi terus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan berbagai cara, seperti melalui pendidikan, sosialisasi, dialog, dan kebijakan yang berpihak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu contohnya adalah melalui pelaksanaan program pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk kesadaran nasional dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Selain itu, program-program yang mempromosikan toleransi dan perdamaian antar suku, agama, dan budaya juga terus dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan agar setiap warga negara dapat hidup berdampingan dengan harmonis tanpa adanya konflik atau diskriminasi. Dengan upaya integrasi yang terus dilakukan, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan global serta mampu memanfaatkan keanekaragaman sebagai kekuatan untuk memajukan bangsa.

Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada merupakan hal penting dalam upaya integrasi Indonesia. Menghargai perbedaan suku, budaya, agama, dan kepentingan pribadi diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai kekayaan dan keunikan

Indonesia yang harus dilestarikan dan dijaga bersama sebagai satu kesatuan bangsa. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang menghargai perbedaan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Selain itu, pendidikan multikultural juga perlu ditingkatkan untuk membentuk generasi muda yang menghargai dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang majemuk. Tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal mengacu pada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang etnis, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Tantangan dalam dimensi ini dapat timbul karena adanya diskriminasi, persaingan ekonomi yang tidak seimbang, ketidakadilan sosial, dan perbedaan pandangan politik. Tantangan ini dapat diatasi dengan mendorong dialog antar suku, budaya, dan agama, memperkuat hubungan sosial antar komunitas, dan menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi. Sementara itu, dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan dalam dimensi ini meliputi adanya sentimen separatisme, penolakan terhadap kebijakan pusat, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk memperkuat integrasi nasional, dapat dibangun kerangka kerja berikut:

1. Pendidikan: Pendidikan harus menjadi prioritas untuk memperkuat integrasi nasional. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, toleransi, dan menghargai keberagaman. Pendidikan juga harus merangkul semua elemen masyarakat dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok.
2. Komunikasi: Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun hubungan positif antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Media

- massa, baik cetak maupun digital, dapat digunakan untuk mempromosikan dialog antara kelompok yang berbeda dan mengurangi konflik. Penggunaan media sosial harus diawasi dan diatur agar tidak memperburuk situasi.
3. Kebijakan publik: Kebijakan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang.
 4. Pengembangan ekonomi: Ekonomi yang kuat dan berkembang dapat memperkuat integrasi nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran yang lebih besar untuk semua kelompok dalam masyarakat. Dalam mengembangkan ekonomi, perlu diupayakan pemerataan pembangunan antarwilayah agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
 5. Promosi budaya: Budaya nasional harus dipromosikan dan dihargai. Program-program budaya harus dirancang untuk mempromosikan kesenian, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Promosi budaya dapat memperkuat rasa bangga sebagai bagian dari bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang beragam.
 6. Hukum dan keamanan: Hukum dan keamanan harus diterapkan secara adil dan merata untuk semua kelompok dalam masyarakat. Dalam menjaga keamanan, perlu menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
 7. Kegiatan sosial: Kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat dapat memperkuat hubungan antara kelompok yang berbeda. Kegiatan sosial dapat menjadi platform untuk

mempromosikan dialog, saling pengertian, dan toleransi.

1.4.5 Hakikat konstitusi

Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang berisi prinsip-prinsip, nilai-nilai, serta aturan-aturan dasar yang mengatur negara dan rakyatnya. Hakikat konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi sebagai hukum tertinggi: Konstitusi berada di atas semua undang-undang dan peraturan lainnya di negara tersebut. Konstitusi harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan rakyat.
2. Konstitusi sebagai piagam kebebasan: Konstitusi menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individu, serta memberikan perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain.
3. Konstitusi sebagai instrumen pembagian kekuasaan: Konstitusi membagi kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing cabang.
4. Konstitusi sebagai instrumen pengaturan hubungan antarlembaga negara: Konstitusi menetapkan hubungan antarlembaga negara, antara pusat dan daerah, serta antara negara dan rakyat.
5. Konstitusi sebagai instrumen pengaturan hubungan antarnegara: Konstitusi juga dapat mengatur hubungan antarnegara, termasuk perjanjian dan hukum internasional.
6. Konstitusi sebagai instrumen pembentukan norma hukum: Konstitusi dapat menjadi sumber pembentukan hukum, termasuk dalam hal pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
7. Konstitusi sebagai instrumen perubahan sosial: Konstitusi dapat

menjadi instrumen untuk menciptakan perubahan sosial dan politik, termasuk dalam hal reformasi kelembagaan, pembaruan sistem pemerintahan, dan perubahan nilai-nilai dan norma sosial.

Dalam hakikatnya, konstitusi merupakan instrumen utama yang membentuk dasar dari sistem pemerintahan dan masyarakat dalam suatu negara. Konstitusi memastikan bahwa pemerintahan dan masyarakat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang dasar negara tersebut. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi umumnya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya mengacu pada kewenangan dan wewenang pemerintah yang diatur dalam konstitusi. Konstitusi menetapkan batasan-batasan tertentu pada pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta membatasi tindakan pemerintah yang dapat mengganggu hak-hak tersebut. Misalnya, konstitusi dapat membatasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau membatasi kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak individu lainnya. Sementara pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu mengacu pada batasan-batasan waktu yang diatur dalam konstitusi terhadap pemerintah. Konstitusi dapat menetapkan batasan waktu tertentu pada kekuasaan pemerintah, misalnya, masa jabatan kepala negara, periode pemilihan anggota parlemen, dan jangka waktu pelaksanaan kebijakan tertentu. Pembatasan waktu ini membantu memastikan bahwa pemerintah tidak berkuasa secara berkelanjutan dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih dan mengawasi tindakan pemerintah secara teratur. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi sangat penting untuk memastikan bahwa

pemerintah tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu, serta memastikan bahwa pemerintah tidak mengambil kekuasaan secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara.

Konstitusi memang merupakan sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Namun, pengertian konstitusi tidak hanya terbatas pada hal tersebut saja. Konstitusi juga mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Selain itu, konstitusi juga berperan sebagai hukum dasar negara yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada undang-undang dan peraturan lainnya. Konstitusi dapat membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta menetapkan aturan-aturan dasar yang mengatur fungsi-fungsi lembaga negara. Konstitusi juga mencakup prinsip-prinsip yang mendasar dalam suatu negara, seperti prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi ini pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. UU Dasar 1945 terdiri dari beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan internasional. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali perubahan, tetapi prinsip dasar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan. Sebagai konstitusi tertulis bagi negara, UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan pemerintah. Konstitusi ini juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi hak-hak dasar masyarakat Indonesia, seperti hak atas kebebasan berpendapat,

hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang merupakan dasar bagi sistem pemerintahan Indonesia, dan mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara serta struktur dan fungsi pemerintah. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan melalui Amandemen dan dipahami sebagai konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sebagai hukum dasar yang sah, UUD 1945 harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara dan pemerintah Indonesia.

1.4.6 Implementasi hak dan kewajiban warga negara

Implementasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 serta peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan implementasinya:

1. Hak-hak warga negara

Hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi: Warga negara Indonesia dapat mengeluarkan pendapat, memberikan saran, dan melakukan kritik terhadap pemerintah atau lembaga publik lainnya. Hak ini dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan dapat dilaksanakan melalui media massa atau demonstrasi damai.

2. Hak atas kesehatan

Warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Implementasi hak ini dilakukan melalui program-program kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.

3. Hak atas Pendidikan

Warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Implementasi hak ini dilakukan melalui program-program pendidikan nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

4. Kewajiban membayar pajak

Warga negara Indonesia memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik.

5. Kewajiban mematuhi hukum

Warga negara Indonesia memiliki kewajiban mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga lainnya.

6. Kewajiban ikut serta dalam pemilihan umum

Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, gubernur, bupati/wali kota, anggota legislatif, maupun pemilihan kepala desa. Ini merupakan wujud dari partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia.

Implementasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah. Pemerintah harus memastikan hak dan kewajiban warga negara dijamin dan dilaksanakan secara adil dan merata, sedangkan individu harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Sebagai warga negara, penting untuk memahami hak dan kewajiban yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemahaman ini akan membantu kita untuk memposisikan diri secara tepat dalam mengambil tindakan atau keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memposisikan diri atas hak, sebaiknya kita memahami bahwa hak yang dimiliki bukan bersifat absolut dan tidak boleh mengesampingkan hak-hak

orang lain atau kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan hak, kita harus memperhatikan batas-batas yang diatur oleh hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.

Sementara itu, dalam memposisikan diri atas kewajiban, kita harus menganggapnya sebagai tanggung jawab dan kontribusi kita sebagai warga negara untuk memajukan dan memperkuat negara dan bangsa. Kewajiban-kewajiban tersebut harus diemban secara sadar dan bertanggung jawab, tidak hanya sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan. Dalam melakukan hak dan kewajiban, sebaiknya kita juga memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini penting agar tindakan kita tidak hanya memenuhi kepentingan pribadi, namun juga memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Dengan memposisikan diri secara tepat atas hak dan kewajiban, kita dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun dan memajukan Indonesia.

Setiap orang memiliki andil dalam mengusahakan keamanan negara. Keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengusahakan keamanan negara, karena masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang hidup dalam suatu negara, merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi keamanan negara. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengusahakan keamanan negara antara lain:

1. Melaporkan segala kejadian atau tindakan yang mencurigakan atau merugikan keamanan negara kepada pihak yang berwenang.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan negara

dan menolak tindakan yang merugikan keamanan negara, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, terorisme, dan sejenisnya.

3. Menjalin kerja sama dengan aparat keamanan dan instansi lain yang bertugas dalam menjaga keamanan negara.
4. Memperkuat jaringan komunikasi dengan masyarakat sekitar, untuk meningkatkan informasi dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan keamanan negara.
5. Meningkatkan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Kita harus menjadi warga negara yang sadar akan pentingnya menjaga keamanan negara dan melakukan tindakan-tindakan konkret untuk menjaga dan meningkatkan keamanan negara.

Manifestasi setiap kewajiban warga negara intinya adalah bagaimana setiap individu mengambil peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Setiap kewajiban yang diemban oleh warga negara pada dasarnya bertujuan untuk memelihara dan memperkuat keberlangsungan negara dan bangsa, salah satunya dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Beberapa manifestasi kewajiban warga negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat antara lain patuh pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak melakukan tindakan kriminal yang merugikan keamanan masyarakat. Tidak melakukan tindakan diskriminatif atau merugikan hak orang lain yang berada dalam masyarakat. Melaporkan tindakan kriminal atau tindakan merugikan keamanan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Membantu aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan informasi yang diperlukan. Menjalin hubungan yang baik dan saling menghormati dengan sesama warga negara di lingkungan sekitar, untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, sebaiknya

dilakukan dengan sadar dan bertanggung jawab, bukan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan. Setiap individu harus memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta memahami bahwa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh komponen masyarakat.

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat. Pemenuhan kewajiban oleh seseorang dapat memperoleh hak yang seharusnya diberikan oleh negara atau pihak lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak dapat kita dapatkan setelah pemenuhan kewajiban. Sebagai contoh, jika seseorang telah memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang tersebut berhak mendapatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana pajak yang telah dibayarkan. Demikian pula, jika seseorang telah memenuhi kewajiban dalam hal pemilihan umum, yaitu dengan memberikan suara pada calon yang dianggap layak, maka orang tersebut berhak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan hak-haknya sebagai warga negara. Namun, tidak semua hak yang dimiliki oleh warga negara tergantung pada pemenuhan kewajiban. Beberapa hak fundamental seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi, seharusnya dijamin oleh negara tanpa terkait dengan kewajiban tertentu. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban sebagai warga negara dapat dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hak yang diberikan oleh negara, sehingga kewajiban dan hak pada dasarnya saling mendukung satu sama lain.

BAB II

URGENSI DAN ESENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MASA DEPAN

Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk masa depan karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang baik serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pancasila adalah dasar ideologis negara Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila membentuk dasar hukum dan moral bagi negara, termasuk konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Esensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajiban mereka, serta membentuk karakter yang menghargai keberagaman, menghormati hak asasi manusia, memahami nilai-nilai demokrasi, serta memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Urgensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah bahwa pada masa depan, warga negara yang memiliki kemampuan dan kesadaran kewarganegaraan yang baik akan sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan dan kemajuan bangsa. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan analitis yang dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan akan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat memperkuat identitas nasional dan membantu mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat merusak keutuhan bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara dapat memahami pentingnya kerja sama antar-individu, kelompok, dan bangsa dalam membangun kebersamaan dan solidaritas sosial.

Dalam era digital dan informasi yang semakin maju, pendidikan

kewarganegaraan juga dapat membantu warga negara untuk memahami dan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, serta membentuk kesadaran tentang perlindungan data pribadi dan informasi digital. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan memiliki esensi dan urgensi yang sangat penting untuk masa depan bangsa, karena dapat membentuk warga negara yang memiliki karakter yang baik, kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta kesadaran kewarganegaraan yang tinggi, yang pada akhirnya dapat memperkuat kestabilan dan kemajuan bangsa di masa depan.

Konsep Nasionalisme: Rasa Bangga dan Rasa Tanggung Jawab Bagi Warga Negara

Konsep warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab adalah konsep yang menggambarkan sifat-sifat yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara dalam sebuah negara. Warga negara yang bangga dan cinta tanah air adalah mereka yang memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara tempat mereka tinggal. Mereka menghargai sejarah, budaya, dan tradisi negara mereka serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Mereka juga menghargai keberagaman dan menghormati hak-hak asasi manusia serta memelihara keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, warga negara yang memiliki nasionalisme adalah mereka yang memiliki rasa kebanggaan atas identitas nasional mereka, serta memiliki tekad dan semangat untuk memajukan negara mereka. Mereka juga memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil dapat memengaruhi dan berdampak pada negara dan masyarakatnya. Terakhir, warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab adalah mereka yang merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kemajuan negara dan masyarakatnya. Mereka sadar bahwa sebagai warga negara, mereka memiliki

peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam membangun negara dan masyarakat yang lebih baik. Dengan memiliki konsep warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kebersamaan dan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemajuan dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya.

2.1.1 Konsep Cinta Terhadap Tanah Air (Nasionalis)

Konsep cinta tanah air atau nasionalisme adalah suatu ideologi atau pandangan yang menekankan pentingnya rasa cinta, kesetiaan, dan identitas terhadap negara atau bangsa tempat seseorang berasal. Konsep ini sering kali dihubungkan dengan konsep patriotisme, di mana seseorang merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan negaranya. Seorang nasionalis biasanya mempunyai kebanggaan yang tinggi terhadap sejarah, budaya, bahasa, dan tradisi negaranya serta berupaya memperjuangkan kepentingan nasional dan kemajuan negaranya. Mereka memandang bahwa keberadaan dan kejayaan negara mereka merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dijaga serta diperjuangkan.

Konsep cinta tanah air atau nasionalisme juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini dapat mengarah pada tindakan diskriminasi, rasisme, atau bahkan ekstremisme. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Dalam konteks Indonesia, konsep cinta tanah air atau nasionalisme tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebhinekaan dan persatuan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, penting untuk memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara serta berkontribusi untuk memajukan bangsa

dan negara Indonesia.

Nasionalisme adalah ideologi atau pandangan yang menekankan pentingnya rasa cinta, kesetiaan, dan identitas terhadap negara atau bangsa tempat seseorang berasal. Konsep ini sering kali dihubungkan dengan konsep patriotisme, di mana seseorang merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan negaranya. Seorang nasionalis biasanya memiliki rasa bangga dan identitas yang kuat terhadap sejarah, budaya, bahasa, dan tradisi negaranya serta berupaya memperjuangkan kepentingan nasional dan kemajuan negaranya. Mereka memandang bahwa keberadaan dan kejayaan negara mereka merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dijaga serta diperjuangkan. Rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) tidak secara otomatis berkembang menjadi sebuah paham atau ideologi (isme) seperti nasionalisme atau chauvinisme. Namun, rasa cinta terhadap tanah air dapat menjadi dasar atau landasan untuk membangun sebuah ideologi atau paham yang berhubungan dengan kepentingan dan kejayaan negara atau bangsa. Paham nasionalisme, sebagai contoh, sering kali dianggap sebagai hasil dari rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air yang berkembang menjadi sebuah ideologi yang menekankan pentingnya kepentingan nasional dan kejayaan negara. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua rasa cinta terhadap tanah air berkembang menjadi sebuah ideologi atau paham. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi proses terbentuknya sebuah paham atau ideologi, seperti faktor sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai warga negara yang baik, penting untuk memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air namun juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan identitas dan pandangan. Hal ini dapat membantu membangun negara yang lebih kuat, maju, dan damai.

Dalam perkembangan sejarahnya, paham nasionalisme sering kali dianggap sebagai inspirasi atau landasan untuk munculnya berbagai bentuk ideologi dan falsafah kenegaraan di berbagai negara di dunia. Sebagai contoh, di Indonesia, paham nasionalisme menjadi dasar dan inspirasi untuk merumuskan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan yang mengatur nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia. Di negara lain, seperti di Prancis, paham nasionalisme juga menjadi dasar dan inspirasi untuk lahirnya ideologi republikanisme yang menekankan pentingnya kebebasan, persamaan, dan solidaritas dalam mewujudkan kejayaan negara. Sedangkan di Amerika Serikat, paham nasionalisme juga menjadi dasar dan inspirasi untuk lahirnya ideologi liberalisme yang menekankan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan dalam mewujudkan kemajuan dan kejayaan negara.

Paham nasionalisme tidak selalu dianggap sebagai hal yang positif dan produktif. Paham nasionalisme yang ekstrim atau chauvinisme dapat memicu tindakan diskriminasi, rasisme, dan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan identitas nasional atau ideologi negara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memperkuat nilai-nilai universal seperti persamaan, keadilan, dan persatuan dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan bangsa dan negara. Rasa cinta tanah air juga memiliki kaitan erat dengan kedaulatan suatu negara. Kedaulatan suatu negara mengacu pada hak negara untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain atau kekuatan asing. Kedaulatan negara juga mencakup hak negara untuk menjaga keamanan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional yang mendasar. Dalam konteks ini, rasa cinta tanah air dapat menjadi dasar untuk memperkuat kedaulatan suatu negara, karena rasa cinta tanah air dapat memotivasi warga negara untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan kepentingan nasional negara mereka. Warga negara yang memiliki rasa cinta

tanah air yang kuat juga dapat membantu memperkuat kedaulatan negara dengan cara menjaga integritas wilayah, mempertahankan kedaulatan laut dan udara, dan membela kepentingan nasional dari campur tangan asing.

Rasa cinta tanah air dan kedaulatan negara tidak boleh dipahami secara sempit dan eksklusif, dan harus diiringi dengan nilai-nilai universal seperti persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Kedaulatan negara tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menindas atau mengabaikan hak-hak individu atau kelompok dalam negara tersebut. Sebagai sebuah negara, penting bagi masyarakat dan mahapeserta didik untuk menghargai dan mempelajari sejarah nasionalisme di masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan memahami sejarah nasionalisme di masa lalu, masyarakat dan mahapeserta didik dapat mempelajari dari kesalahan dan pencapaian di masa lalu untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang lebih baik di masa depan. Masyarakat dan mahapeserta didik dapat membantu membangkitkan kembali semangat nasionalisme di masa lalu dengan cara mengenang dan memperingati peristiwa penting yang terjadi di masa lalu, serta meneliti kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari nasionalisme di masa lalu. Masyarakat dan mahapeserta didik juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan politik yang menunjukkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan, serta mengembangkan wawasan tentang keberagaman dan keragaman budaya di dalam negeri.

Membangkitkan kembali semangat nasionalisme di masa lalu tidak berarti melupakan keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat. Semangat nasionalisme yang positif adalah semangat yang dapat mempersatukan masyarakat dalam keberagaman dan keragaman budaya, dan bukan semangat yang menekankan superioritas atau dominasi kelompok tertentu. Jika masyarakat suatu negara tidak memiliki ketahanan terhadap era globalisasi,

maka negara tersebut akan mengalami berbagai dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain:

1. Penurunan daya saing: Negara yang tidak mampu mengikuti perkembangan globalisasi akan sulit bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan pendidikan.
2. Ketergantungan: Negara yang tidak mampu mengelola dampak globalisasi dengan baik cenderung menjadi terlalu bergantung pada negara-negara lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan keamanan.
3. Ketimpangan: Globalisasi dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak diatur dengan baik. Negara yang tidak memiliki ketahanan terhadap era globalisasi akan sulit untuk mengelola dampak ketimpangan tersebut.
4. Krisis identitas: Globalisasi dapat mengancam keberlangsungan identitas nasional dan budaya. Negara yang tidak memiliki ketahanan terhadap era globalisasi dapat mengalami krisis identitas yang dapat memicu konflik dalam masyarakat.

Untuk itu, sangat penting bagi negara untuk membangun ketahanan terhadap era globalisasi dengan meningkatkan daya saing, meminimalkan ketergantungan, mengelola ketimpangan, serta mempertahankan dan memperkuat identitas nasional dan budaya. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membangun ketahanan terhadap era globalisasi dengan meningkatkan literasi digital, mempelajari dan menghargai keanekaragaman budaya, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan globalisasi di tingkat lokal maupun nasional. Cinta tanah air adalah rasa kecintaan atau kasih sayang yang mendalam terhadap tanah kelahiran atau negara tempat seseorang tinggal. Rasa cinta ini muncul karena adanya ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara seseorang dengan negara atau tanah

airnya. Rasa cinta terhadap tanah air sering kali juga dihubungkan dengan nasionalisme, yaitu kesadaran dan kebanggaan akan identitas nasional dan budaya yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam konteks sosial dan politik, cinta tanah air sering kali dianggap sebagai nilai yang penting dan diperlukan untuk memperkuat integritas nasional dan membangun kesatuan bangsa.



Gambar 6. Perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa

(Sumber: <https://primaindisoft.com/>)

Cinta tanah air dan bangsa memang merupakan suatu sikap yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan dalam berperilaku dan bertindak untuk kejayaan dan kebahagiaan negara serta bangsa. Cinta tanah air dan bangsa harus diwujudkan dalam perbuatan nyata, seperti berpartisipasi dalam pembangunan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keutuhan negara, mengingat Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Dengan adanya sikap cinta tanah air dan bangsa, maka masyarakat akan lebih memiliki semangat untuk bekerja sama dan menghargai perbedaan dalam membangun negara dan

bangsa. Selain itu, sikap ini juga dapat membantu dalam memperkuat identitas nasional dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, kita memang memiliki kewajiban untuk mencintai tanah air dan bangsa. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, setiap warga negara Indonesia diharapkan memiliki sikap dan tindakan nyata yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Misalnya dengan menghormati simbol-simbol kebangsaan seperti Bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, kerja sama, dan toleransi.

Selain itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga diharapkan untuk turut serta dalam pembangunan negara dan memperjuangkan kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Dengan memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, kita dapat membantu memperkuat identitas nasional, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Untuk memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, seseorang perlu memahami identitas dan sejarah bangsa dan negaranya. Dengan memahami sejarah bangsa dan negara, seseorang dapat memahami bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dengan memahami identitas bangsa dan negara, seseorang dapat memahami kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini, rasa cinta terhadap tanah air juga dapat mendorong

seseorang untuk melestarikan kebudayaan dan menjaga keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan sejarah dan pembelajaran mengenai identitas bangsa dan negara merupakan hal yang penting dalam membentuk rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang mendorong partisipasi dan pengabdian untuk kepentingan masyarakat dan negara juga dapat membantu memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rasa cinta terhadap tanah air adalah:

1. Pendidikan: Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk rasa cinta terhadap tanah air. Pendidikan yang baik dan benar dapat membentuk pemahaman yang baik tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa serta memperkuat rasa cinta terhadap tanah air.
2. Pengalaman: Pengalaman dapat mempengaruhi seseorang dalam membentuk rasa cinta terhadap tanah air. Pengalaman tersebut bisa berasal dari berbagai aktivitas seperti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, atau bahkan dari pengalaman traveling ke berbagai daerah di Indonesia.
3. Lingkungan: Lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan pergaulan juga mempengaruhi pembentukan rasa cinta terhadap tanah air. Lingkungan yang memperlihatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keharmonisan lingkungan sekitar dapat membentuk rasa cinta terhadap tanah air.
4. Kepemimpinan: Kepemimpinan yang baik dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara dapat mempengaruhi rasa cinta terhadap tanah air. Kepemimpinan yang memiliki integritas, kepemimpinan yang berdedikasi dan melayani masyarakat dapat membentuk rasa cinta terhadap tanah air.

5. Media Sosial: Penggunaan media sosial yang positif dan sehat dapat membantu membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air, namun sebaliknya jika media sosial digunakan dengan tidak bijak dan membawa dampak negatif, maka dapat merusak rasa cinta terhadap tanah air.
6. Kondisi Negara: Kondisi negara yang stabil dan damai, serta kemajuan pembangunan yang terlihat dapat mempengaruhi rasa cinta terhadap tanah air. Sebaliknya, ketidakstabilan dan kerusakan politik serta stagnasi pembangunan dapat mengurangi rasa cinta terhadap tanah air.

2.1.2 Teori-teori tentang nasionalisme

Ada beberapa teori yang mengajukan pandangan tentang nasionalisme, di antaranya:

1. Teori Modernisasi: Teori ini menganggap bahwa nasionalisme muncul karena perkembangan ekonomi, politik, dan sosial suatu negara yang memungkinkan munculnya kesadaran identitas nasional. Dalam teori ini, nasionalisme dipandang sebagai hasil dari modernisasi dan perkembangan bangsa.
2. Teori Primordialisme: Teori ini menganggap bahwa nasionalisme muncul dari ikatan bawaan manusia, seperti kekerabatan, agama, etnis, dan budaya. Dalam teori ini, nasionalisme dipandang sebagai hasil dari ikatan primordial yang kuat.
3. Teori Konstruktivisme: Teori ini menganggap bahwa nasionalisme adalah konstruksi sosial yang dibangun melalui simbol-simbol nasional, sejarah, dan budaya. Dalam teori ini, nasionalisme dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat.
4. Teori Perkembangan: Teori ini menganggap bahwa nasionalisme

muncul karena adanya perkembangan kebudayaan dan kesadaran identitas di suatu masyarakat. Dalam teori ini, nasionalisme dipandang sebagai hasil dari perkembangan budaya dan identitas yang berkembang di suatu negara.

5. Teori Elit: Teori ini menganggap bahwa nasionalisme muncul karena adanya pengaruh dari kelompok elit di suatu masyarakat. Dalam teori ini, nasionalisme dipandang sebagai hasil dari pengaruh yang diberikan oleh kelompok elit terhadap kesadaran identitas nasional.
6. Teori Interaksi Sosial: Teori ini menganggap bahwa nasionalisme muncul karena adanya interaksi sosial antara kelompok-kelompok di suatu masyarakat. Dalam teori ini, nasionalisme dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran identitas nasional yang sama.

2.1.3 Proses Penanaman Nasionalisme di Indonesia

Proses penanaman nasionalisme di Indonesia dilakukan sejak masa penjajahan Belanda dan terus berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam proses penanaman nasionalisme di Indonesia:

1. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan gerakan yang dilakukan oleh para tokoh nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20 untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Gerakan nasional ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.
2. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia juga berperan penting dalam penanaman nasionalisme. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan nasional terbatas hanya untuk kaum elit pribumi.

Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan nasional menjadi hak bagi semua rakyat Indonesia.

3. Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga menjadi faktor penting dalam penanaman nasionalisme di Indonesia. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional karena dianggap sebagai bahasa yang dapat menghubungkan berbagai suku dan daerah di Indonesia.
4. Kebudayaan. Kebudayaan Indonesia juga menjadi faktor penting dalam penanaman nasionalisme. Melalui seni dan budaya, rakyat Indonesia dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.
5. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga berperan penting dalam penanaman nasionalisme. Pancasila mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Proses penanaman nasionalisme di Indonesia masih terus berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai upaya untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang majemuk. Penanaman rasa nasionalisme di Indonesia juga dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945: UUD 1945 memuat berbagai nilai-nilai nasionalisme, seperti Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebhinekaan, dan penekanan pada kedaulatan rakyat dan kepentingan nasional.
2. Pendidikan Nasional: Pendidikan di Indonesia juga merupakan sarana penting dalam penanaman rasa nasionalisme. Melalui kurikulum dan kegiatan di sekolah, peserta didik dapat mempelajari nilai-nilai nasionalisme, sejarah bangsa, dan kebhinekaan.
3. Sumpah Pemuda: Pada 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda dari

berbagai daerah di Indonesia menyatakan Sumpah Pemuda yang memuat tekad untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.

4. Hari Kemerdekaan: Hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus juga menjadi momentum untuk memupuk rasa nasionalisme, dengan kegiatan peringatan yang diadakan oleh pemerintah dan masyarakat.

5. Simbol-simbol nasional

Perlu dibangun paradigma baru dalam pendidikan yang melihat pendidikan sebagai bagian integral dari proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu keutuhan. Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia yang bukan hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, tetapi juga memiliki kesadaran tentang peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi untuk kemajuan negara dan masyarakat. Paradigma pendidikan baru yang diusulkan harus mencakup kurikulum yang mencakup pembelajaran nilai-nilai sosial dan keterampilan interpersonal, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global seperti teknologi dan perubahan lingkungan. Selain itu, paradigma pendidikan baru juga harus mengintegrasikan pembelajaran di luar kelas dengan pengalaman di lapangan dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, seperti organisasi sosial dan partisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini akan membantu mengembangkan sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam mengambil bagian dalam pembangunan negara dan masyarakat.

Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah *civic virtue* atau kebajikan sipil. *Civic virtue* adalah konsep yang merujuk pada sikap dan perilaku positif warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka

dalam masyarakat, seperti partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi (Coupet, 2020). *Civic virtue* melibatkan sikap dan tindakan seperti kejujuran, integritas, solidaritas, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Hal ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan orang lain, dan menghormati hak asasi manusia dan hukum. Dalam konteks kewarganegaraan, *civic virtue* sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Ketika warga negara memiliki *civic virtue*, mereka akan lebih mampu berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan masyarakat harus mencakup pembelajaran tentang *civic virtue*, agar generasi muda dapat memahami pentingnya sikap dan perilaku positif dalam membangun budaya kewarganegaraan yang kuat dan berkelanjutan. Pendidikan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk mengembangkan akhlak kewarganegaraan yang positif dan membangun budaya kewarganegaraan yang kuat di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga dapat membentuk akhlak dan sikap kewarganegaraan yang positif pada individu.

Melalui pendidikan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mempelajari tentang nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Mereka juga dapat mempelajari cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari, seperti dalam berinteraksi dengan sesama warga negara, dalam kegiatan sosial dan politik, dan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan alam sekitar. Pendidikan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mengembangkan akhlak kewarganegaraan yang positif, seperti rasa cinta tanah air, rasa persatuan, solidaritas, toleransi, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Hal ini akan membantu membangun budaya kewarganegaraan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, serta dalam kegiatan masyarakat secara luas, untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki dasar moral yang kuat dalam membangun masa depan bangsa. Dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran perlu mengandung muatan nasional, muatan regional, dan muatan lokal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional, memperkuat identitas daerah, serta mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Muatan nasional merujuk pada pembelajaran tentang nilai-nilai, sejarah, budaya, dan bahasa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Muatan nasional penting untuk memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik. Muatan regional merujuk pada pembelajaran tentang nilai-nilai, sejarah, budaya, dan bahasa yang khas dari suatu wilayah atau daerah tertentu di Indonesia. Pembelajaran tentang muatan regional penting untuk memperkuat identitas daerah, menghormati keanekaragaman budaya Indonesia, dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Muatan lokal merujuk pada pembelajaran tentang kekhasan masyarakat setempat, seperti adat istiadat, bahasa, dan budaya lokal. Pembelajaran tentang muatan lokal penting untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, dan untuk

memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

Dengan memadukan muatan nasional, regional, dan lokal dalam kurikulum dan strategi pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia, serta memperkuat identitas nasional dan daerah mereka. Selain itu, pembelajaran yang terkait dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dapat meningkatkan keterkaitan antara sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan relevansi pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran harus memperhatikan dan memadukan muatan nasional, regional, dan lokal, untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang komprehensif dan bermakna.

BAB III

URGENSI DAN ESENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PENENTU PEMBANGUNAN KARAKTER DAN BANGSA

3.1 Urgensi Dan Konsep Identitas Nasional

Secara umum, identitas nasional merujuk pada kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, dan karakteristik yang dianggap khas atau unik dari suatu bangsa atau negara. Identitas nasional penting karena dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap bangsanya, memberikan rasa persatuan dan kebanggaan, dan dapat mempengaruhi keputusan politik dan sosial.



Gambar 7. Memahami Identitas Nasional negara Indonesia

(Sumber: <https://muhammadriwandiblog.wordpress.com>)

3.2 Pentingnya Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun kebersamaan dan keutuhan sebuah negara. Berikut ini adalah

beberapa alasan mengapa identitas nasional diperlukan:

1. Meningkatkan Solidaritas: Identitas nasional dapat mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Dengan memiliki identitas nasional yang sama, masyarakat dapat merasa memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang lebih kuat.
2. Meningkatkan Kepedulian: Identitas nasional juga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap negaranya. Masyarakat yang memiliki rasa kebanggaan terhadap identitas nasionalnya cenderung lebih aktif dalam mengambil bagian dalam kegiatan yang dapat membantu memajukan negara mereka.
3. Mempertahankan Kedaulatan: Identitas nasional juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, masyarakat akan lebih
4. cenderung untuk mempertahankan integritas wilayah negaranya dan menentang usaha pengambilalihan wilayah oleh negara lain.
5. Memperkuat Perekat Sosial: Identitas nasional juga dapat berperan sebagai perekat sosial, yang membantu masyarakat untuk mengatasi konflik atau perbedaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sosial.
6. Meningkatkan Reputasi Internasional: Identitas nasional yang kuat dan terjaga dengan baik dapat membantu meningkatkan reputasi internasional sebuah negara. Hal ini dapat membantu meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain dan memperkuat posisi negara di dunia internasional.

3.3 Sumber Historis, Sosiologis, Dan Politik Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional Indonesia adalah produk sejarah, sosial, dan politik yang kompleks. Dalam memahami identitas nasional Indonesia, kita perlu

menggali sumber historis, sosiologis, dan politik yang terkait dengan perkembangan identitas nasional Indonesia. Berikut adalah beberapa sumber historis, sosiologis, dan politik yang terkait dengan identitas nasional Indonesia. **Sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia:** Sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Beberapa kerajaan yang terkenal di Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, telah memberikan sumbangan besar dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Selain itu, penjajahan oleh Belanda selama hampir tiga abad juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk identitas nasional Indonesia. **Multikulturalisme:** Indonesia merupakan negara yang multikultural, dengan lebih dari 300 suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari zaman Majapahit, merupakan salah satu nilai penting yang dijunjung tinggi dalam membentuk identitas nasional Indonesia.

Perjuangan Kemerdekaan: Perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Pada saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. **Pancasila:** Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang telah menjadi landasan dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai Indonesia yang inklusif, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan demokrasi. **Bahasa Indonesia:** Bahasa Indonesia juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Identitas nasional Indonesia merupakan produk dari berbagai sumber historis, sosiologis, dan politik yang kompleks.

Dalam memahami identitas nasional Indonesia, perlu diperhatikan

berbagai faktor tersebut agar kita dapat menghargai dan memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai satu kesatuan yang kokoh.

3.3.1 *Bendera Negara Sang Merah Putih*

Bendera Negara Sang Merah Putih adalah bendera kebangsaan Indonesia yang telah menjadi simbol penting dari identitas nasional Indonesia. Bendera ini terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih, dengan ukuran panjang dan lebar yang sama. Merah melambangkan keberanian dan semangat, sementara putih melambangkan kesucian dan ketulusan hati. Sejarah bendera merah putih Indonesia bermula pada tahun 1928, ketika para pemuda Indonesia membentuk organisasi pemuda bernama "Boedi Oetomo". Organisasi ini menetapkan bendera merah putih sebagai simbol perjuangan mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, bendera merah putih diresmikan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Bendera ini melambangkan semangat kebangsaan, perjuangan, dan persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Bendera ini juga dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia dan diibaratkan sebagai lambang kesatuan yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Bendera merah putih Indonesia juga digunakan dalam berbagai momen penting, seperti perayaan hari kemerdekaan Indonesia, upacara kenegaraan, dan dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan bendera merah putih dalam berbagai momen tersebut menunjukkan rasa kecintaan rakyat Indonesia terhadap negara dan bangsa Indonesia. Dalam kesimpulannya, bendera merah putih Indonesia merupakan simbol penting dari identitas nasional Indonesia.



Gambar 8. Bendera Merah Putih

(Sumber: <https://retizen.republika.co.id>)

3.3.2 Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Bahasa Negara atau bahasa resmi Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia. Sebagai bahasa negara, Bahasa Indonesia diatur dan dilindungi oleh undang-undang, dan digunakan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, pendidikan, media massa, bisnis, dan sebagainya. Sejarah Bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu, yang telah digunakan oleh masyarakat di wilayah Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Bahasa Melayu awalnya digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara pedagang dari berbagai wilayah. Bahasa Melayu pun berkembang dan menjadi bahasa *lingua franca* atau bahasa pengantar di wilayah Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-16.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah hasil dari penyempurnaan bahasa Melayu yang dipadukan dengan kosakata dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Belanda, Arab, dan Sanskerta. Bahasa Indonesia kemudian diatur dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia

melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang relatif mudah dipelajari dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Kedua, Bahasa Indonesia membantu dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menyediakan bahasa bersama yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga, Bahasa Indonesia juga mempunyai potensi untuk menjadi bahasa internasional yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar negeri.

3.3.3 Lambang Negara Garuda Pancasila

Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, yang terdiri dari burung Garuda yang sedang terbang dengan sayap terbuka dan menggenggam pita dengan kalimat "Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu). Lambang ini juga terdiri dari kepala burung Garuda yang melambangkan Pancasila, yaitu sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ke-3 Persatuan Indonesia, sila ke-4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Lambang Negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II pada tahun 1945, sebelum Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1950, lambang ini diresmikan sebagai lambang negara Indonesia oleh Presiden Sukarno. Pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia didasarkan pada mitologi Hindu-Buddha, dimana burung Garuda dianggap sebagai makhluk suci yang sangat kuat dan berwibawa. Lambang Negara Garuda Pancasila memiliki makna yang mendalam dan menjadi simbol dari ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Garuda sebagai lambang kekuatan dan keberanian, sedangkan Pancasila sebagai dasar dan panduan hidup bagi seluruh

rakyat Indonesia.



Gambar 9. Lambang negara Garuda Pancasila

(Sumber : www.kemlu.go.id)

3.3.4 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia. Lagu ini ditulis oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1928 dan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya memiliki lirik yang terdiri dari tiga bait dan refrain, dengan durasi sekitar satu menit. Lirik lagu ini mengandung makna tentang semangat perjuangan dan patriotisme untuk mencapai kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Lagu Indonesia Raya menjadi salah satu simbol kebanggaan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Lagu ini sering dinyanyikan pada berbagai

acara kenegaraan, upacara, dan kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme dan patriotisme, serta menjadi lagu yang dikumandangkan saat dimainkan pada momen-momen spesial, seperti pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

3.3.5 Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini merupakan lambang dari keragaman budaya, etnis, dan agama yang ada di Indonesia yang diakui dan dihormati dalam kehidupan bernegara. Semboyan ini pertama kali dicetuskan oleh Mpu Tantular, seorang tokoh sastra dan kebudayaan Jawa pada abad ke-14. Semboyan ini kemudian diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Taman Peserta didik, sebagai semboyan kebangsaan Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan prinsip bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan dalam agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan bahasa, namun semuanya tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti penting dalam memupuk kerukunan dan kebersamaan antar masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman. Hal ini tercermin pada Pancasila, yang merupakan ideologi dasar Negara Indonesia, yang juga menegaskan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam keragaman.

3.3.6 Dasar Falsafah Negara Pancasila

Dasar Falsafah Negara Pancasila adalah dasar filosofis yang menjadi landasan bagi Negara Indonesia. Dasar falsafah ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan mencakup nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar dalam

penyelenggaraan negara Indonesia. Kelima nilai dasar ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila dianggap sebagai dasar yang kokoh bagi kehidupan bernegara dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam berperilaku, berpikir, dan bertindak.

3.3.7 *Konstitusi (Hukum Dasar) Negara UUD 1945*

A. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi atau Hukum Dasar Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai UUD 1945. UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang telah diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 mengatur tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sistem ketatanegaraan, serta prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, yaitu Pancasila. Sebagai landasan hukum tertinggi, UUD 1945 memiliki kekuatan mengikat semua pihak di Indonesia, termasuk pemerintah dan masyarakat. Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Jika ada ketentuan dalam UUD 1945 yang dilanggar, maka dapat diproses secara hukum oleh lembaga peradilan yang berwenang.

B. Tahapan Amandemen UUD 1945

Proses amandemen UUD 1945 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- **Inisiatif:** Amandemen UUD 1945 dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau rakyat melalui DPR.
- **Sidang Pansus:** DPR membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk

membahas rancangan amandemen. Pansus kemudian memberikan rekomendasi kepada DPR.

- Sidang Paripurna: DPR membahas rancangan amandemen yang diusulkan oleh Pansus dalam sidang paripurna.
- Persetujuan DPR: Rancangan amandemen harus disetujui oleh 2/3 anggota DPR.
- Penetapan Presiden: Setelah disetujui oleh DPR, rancangan amandemen dikirimkan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Presiden harus menetapkan dalam waktu 30 hari setelah menerima rancangan tersebut.
- Pengumuman: UU amandemen harus diumumkan dalam Lembaran Negara.

Adapun amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa perubahan yang diatur dalam amandemen UUD 1945 antara lain tentang penambahan hak anggota DPR, penambahan hak warga negara asing yang menetap di Indonesia untuk memiliki properti, serta pengurangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari lima tahun menjadi empat tahun.

C. Isi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis yang memuat landasan hukum dan aturan dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia. Berikut adalah isi UUD 1945:

Pembukaan: Menjelaskan tentang tujuan dan cita-cita Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Batang Tubuh UUD 1945:

Pasal 1-2: Menjelaskan tentang bentuk negara (negara kesatuan), wilayah negara (NKRI), dan kedaulatan negara.

Pasal 3: Menjelaskan tentang lambang negara, bahasa negara, dan ibu kota negara.

Pasal 4-7: Menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi presiden, wakil presiden, dan menteri.

Pasal 8-11: Menjelaskan tentang badan legislatif (DPR), badan eksekutif (presiden dan menteri), serta badan yudikatif (mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan badan peradilan lainnya).

Pasal 12-16: Menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.

Pasal 17-18: Menjelaskan tentang hak atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta perekonomian nasional.

Penutup: Menjelaskan tentang cara mengubah UUD 1945, masa berlakunya, serta sumpah atau janji setia kepada negara.

UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, yaitu Pancasila. Sebagai landasan hukum tertinggi, UUD 1945 memiliki kekuatan mengikat semua pihak di Indonesia, termasuk pemerintah dan masyarakat.

D. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sistem yang didasarkan pada UUD 1945, yang menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Secara garis besar, sistem ketatanegaraan

Indonesia terdiri dari tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tugas DPR adalah membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, tugas DPD adalah memberikan pendapat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memimpin pemerintahan, menjalankan kebijakan negara, serta memegang kendali atas aparat negara seperti kepolisian dan militer.

Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif berada di tangan badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan, serta memutuskan perselisihan yang terjadi di antara warga negara atau antara warga negara dengan pemerintah.

Selain itu, di Indonesia juga dikenal sistem desentralisasi yang membagi kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola kepentingannya sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan keberagaman dan kesatuan dalam bingkai negara Indonesia.

E. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, presiden memiliki otoritas penuh dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan negara, termasuk memimpin kabinet dan menentukan kebijakan luar negeri. Di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial terdapat dalam UUD 1945. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membuat kebijakan ekonomi dan sosial, mengambil keputusan dalam situasi darurat, dan menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan presiden juga dibatasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Presiden juga harus mematuhi aturan-aturan yang diatur oleh UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia secara umum, serta tunduk pada pengawasan dari lembaga-lembaga negara lainnya, seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala eksekutif harus bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif untuk membuat kebijakan yang terbaik bagi rakyat. Selain itu, presiden juga tunduk pada pengawasan dari lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang memastikan bahwa presiden dan pemerintah tidak melanggar hukum dan konstitusi negara.

3.3.8 Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berkedaulatan Rakyat

A. Konsep Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan rakyat adalah ide bahwa kekuasaan tertinggi di

negara harus dimiliki oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan, bukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan absolut. Konsep ini merupakan reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja atau penguasa monarki pada masa lalu. Pada masa lalu, kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja atau penguasa monarki sering kali menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. Kekuasaan absolut yang dimiliki oleh penguasa sering kali tidak tunduk pada hukum dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, muncul konsep kedaulatan rakyat sebagai alternatif untuk membatasi kekuasaan absolut penguasa dan memberikan kekuasaan yang sebenarnya kepada rakyat.

Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk memilih pemerintah dan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Pemerintah yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Selain itu, rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang merugikan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokrasi modern, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat secara keseluruhan dan pemerintah dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Di Indonesia, konsep kedaulatan rakyat diakui sebagai prinsip dasar dalam UUD 1945 dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.

B. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945

Konsep kedaulatan rakyat diakui sebagai prinsip dasar dalam UUD NRI Tahun 1945. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada pada rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam Pasal 2 UUD 1945, dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha

Esa dan juga atas kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat juga terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta anggota Badan Perwakilan Rakyat, dipilih dalam pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Selain itu, konsep kedaulatan rakyat juga tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan atas prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga negara atau individu tertentu. Dalam Pasal 18B UUD 1945, juga dikatakan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan secara demokratis dengan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip musyawarah dan mufakat diakui sebagai salah satu ciri khas dari sistem pemerintahan Indonesia yang mengakui konsep kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar. Dalam rangka menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, UUD 1945 juga mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara, dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Secara keseluruhan, konsep kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 memiliki peran penting dalam menjamin terciptanya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat secara keseluruhan dan dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

3.3.9 Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia antara lain:

1. **Multikulturalisme:** Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan tantangan dalam mempertahankan identitas nasional yang merujuk pada kesatuan dan

- persatuan dalam kebhinekaan.
2. Globalisasi: Era globalisasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perilaku konsumen dan tuntutan pasar. Hal ini menyebabkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang merupakan identitas nasional Indonesia.
 3. Radikalisme: Tantangan lain dalam mempertahankan identitas nasional adalah munculnya gerakan-gerakan radikal yang mengeksploitasi perbedaan dan ketidakpuasan masyarakat. Gerakan-gerakan ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak citra Indonesia di mata dunia.
 4. Penggunaan Bahasa Asing: Penggunaan bahasa asing yang semakin merajalela di Indonesia, terutama bahasa Inggris, juga merupakan tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Hal ini memperburuk kondisi bahasa Indonesia yang semakin terpinggirkan dan kurang digunakan.
 5. Kesenjangan Sosial: Kesenjangan sosial yang semakin membesar di Indonesia juga menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Kesenjangan sosial yang tinggi dapat memicu konflik antara berbagai kelompok masyarakat, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

3.4 Urgensi dan Esensi Identitas Nasional Terhadap Perwujudan Bela Negara dan Rasa Nasionalisme

Identitas nasional memiliki esensi dan urgensi dalam menumbuhkan rasa nasionalisme serta perwujudan bela negara. Esensi identitas nasional adalah sebagai penentu karakteristik bangsa dan negara Indonesia yang membedakannya dari bangsa dan negara lainnya. Identitas nasional menjadi

pondasi bagi pembentukan rasa persatuan dan kesatuan, serta membentuk kepercayaan diri sebagai bangsa yang memiliki jati diri yang kuat. Urgensi identitas nasional terlihat dari peran pentingnya dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Identitas nasional menjadi alat untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga memudahkan dalam mempertahankan kedaulatan negara dan membangun hubungan internasional yang harmonis dengan negara-negara lain.

Selain itu, identitas nasional juga berperan penting dalam membentuk rasa bela negara. Rasa bela negara merupakan semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara dan membela kepentingan negara secara sukarela. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, maka rasa bela negara akan tumbuh dan berkembang, sehingga masyarakat akan dengan sukarela melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat identitas nasional menjadi sangat penting. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan, baik formal maupun informal, yang membekali masyarakat dengan pemahaman dan penghargaan terhadap identitas nasional Indonesia. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat penggunaan simbol-simbol nasional, seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan semboyan negara, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

BAB IV

PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI TOLOK UKUR PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Integrasi nasional memiliki urgensi yang sangat penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, integrasi nasional menjadi salah satu parameter utama dalam menjaga keutuhan negara. Salah satu urgensi dari integrasi nasional adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan dan konflik antar kelompok. Jika masing-masing kelompok hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan, maka akan muncul egoisme yang dapat memecah belah kesatuan bangsa.

Selain itu, integrasi nasional juga berperan dalam memperkuat kedaulatan negara. Negara yang memiliki integrasi nasional yang kuat akan lebih mudah dalam menjaga kedaulatannya dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Integrasi nasional juga memberikan manfaat dalam memajukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya integrasi nasional, akan tercipta kerja sama antar daerah yang saling mendukung dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, memperkuat integrasi nasional menjadi penting untuk menjaga keutuhan negara dan memajukan pembangunan. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memperkuat integrasi nasional secara berkelanjutan.

4.1 Konsep dan Pentingnya Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan konsep yang mengacu pada usaha untuk mempersatukan dan memperkuat kesatuan dalam suatu negara yang terdiri dari

berbagai macam kelompok etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Konsep ini sangat penting bagi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kelompok yang memiliki perbedaan budaya dan agama. Urgensi integrasi nasional sangatlah besar karena integrasi nasional menjadi faktor utama dalam mempertahankan keutuhan negara. Jika terjadi perpecahan dan konflik antar kelompok, maka negara akan sulit untuk mencapai kemajuan dan memperkuat kedaulatan negara. Integrasi nasional dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat, sehingga mampu menjaga keutuhan negara.

Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya integrasi nasional, akan tercipta kerja sama antar daerah yang saling mendukung dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Integrasi nasional juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia, sehingga dapat menjaga stabilitas negara. Konsep integrasi nasional juga penting untuk menciptakan harmoni antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Dengan adanya integrasi nasional, maka setiap kelompok masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga tercipta rasa toleransi dan kebersamaan yang kuat. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan konsep yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dibutuhkan upaya yang terus menerus untuk memperkuat integrasi nasional, agar negara dapat terus mencapai kemajuan dan memperkuat kedaulatan negara.

4.1.1 Makna Integrasi nasional

Integrasi nasional merujuk pada proses penggabungan atau penyatuan keberagaman dalam suatu negara untuk mencapai kesatuan yang utuh dan harmonis. Integrasi nasional dapat dicapai melalui upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, memperkuat identitas nasional, mempromosikan toleransi dan keragaman budaya, dan meningkatkan partisipasi politik

masyarakat dalam proses pembangunan. Konsep integrasi nasional sangat penting bagi negara-negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang berbeda, karena tanpa integrasi nasional, negara tersebut mungkin mengalami konflik antarkelompok yang dapat mengancam keutuhan dan stabilitasnya. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi salah satu parameter penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

4.1.2 Jenis Integrasi nasional

Integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Integrasi vertikal: mengacu pada integrasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah pusat diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah negara. Integrasi vertikal juga dapat mencakup upaya untuk mempromosikan kesetaraan sosial-ekonomi antara daerah-daerah yang kurang berkembang dan daerah-daerah yang lebih maju.
2. Integrasi horizontal: mengacu pada integrasi antara kelompok-kelompok sosial, seperti kelompok etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Integrasi horizontal bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya, serta mengurangi konflik antar kelompok. Integrasi horizontal juga dapat mencakup upaya untuk mempromosikan persamaan hak dan kesempatan bagi semua kelompok dalam masyarakat.



Gambar 10. Kelompok budaya yang beragam bersatu.

(Sumber: <https://learning.mentariilmu.sch.id>)

Integrasi adalah sebuah konsep yang luas dan penting dalam konteks sosial dan politik. Ini mengacu pada cara elemen-elemen dalam masyarakat atau kelompok berinteraksi, bersatu, atau berkoordinasi untuk menciptakan stabilitas dan kesatuan. Ada beberapa jenis integrasi yang signifikan, termasuk integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku.

1. Integrasi nilai

Integrasi nilai adalah konsep yang mengacu pada adanya kesepakatan atau konsensus terhadap nilai-nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Integrasi nilai ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kerangka nilai bersama yang dapat membentuk solidaritas sosial, saling menghormati, serta menghargai perbedaan dan keragaman budaya yang ada dalam masyarakat. Integrasi nilai juga membantu dalam memperkuat ikatan antara warga negara dengan negaranya, sehingga memperkuat integrasi nasional secara keseluruhan.



Gambar 11. Orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung (Sumber: <https://bangunjiwo-bantul.desa.id>)

2. Integrasi elite massa

Integrasi elite massa mengacu pada upaya untuk mempersatukan elite dan massa dalam suatu negara atau masyarakat. Hal ini melibatkan kolaborasi antara para pemimpin dan warga masyarakat dalam membangun dan memperkuat ikatan sosial dan politik yang kuat. Integrasi elite massa penting karena mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Dengan adanya integrasi elite massa, diharapkan tercipta sebuah hubungan saling percaya antara pemerintah dan rakyat, sehingga memperkuat stabilitas politik dan mencegah terjadinya konflik atau perpecahan sosial. Hal ini juga membantu memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka integrasi nasional.

3. Integrasi tingkah laku

Integrasi tingkah laku merujuk pada pengakuan dan penerapan norma-norma yang sama dalam perilaku dan tindakan sehari-hari di antara anggota masyarakat. Hal ini mencakup aturan-aturan yang dianggap penting dalam mempertahankan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi tingkah laku merupakan salah satu aspek penting dari integrasi

nasional, karena menciptakan kesamaan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari dapat memperkuat rasa persatuan dan solidaritas antara anggota masyarakat. Ini juga membantu mencegah konflik dan perpecahan sosial, dan memperkuat stabilitas dan keamanan nasional.



Gambar 12. Orang-orang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama (Sumber: <https://ambawangkuala.desakkr.id>)

4.1.3 Urgensi Integrasi nasional

Integrasi nasional memiliki banyak nilai pentingnya, antara lain: **Memperkuat persatuan dan kesatuan:** Integrasi nasional memperkuat persatuan dan kesatuan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti kelompok agama, etnis, dan budaya. Dengan adanya integrasi nasional, anggota masyarakat dapat merasa lebih terikat satu sama lain dan memiliki kesamaan tujuan untuk membangun bangsa. **Meningkatkan solidaritas sosial:** Integrasi nasional juga dapat meningkatkan solidaritas sosial antara anggota masyarakat. Solidaritas sosial merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan sosial yang harmonis di antara

anggota masyarakat. **Meningkatkan stabilitas dan keamanan nasional:** Integrasi nasional dapat membantu mencegah konflik dan perpecahan sosial, serta memperkuat stabilitas dan keamanan nasional. Dengan adanya integrasi nasional, anggota masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkuat sistem pemerintahan dan menjaga kedaulatan negara. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat:** Integrasi nasional juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, anggota masyarakat dapat bekerja sama untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. **Meningkatkan citra dan reputasi negara:** Integrasi nasional dapat membantu meningkatkan citra dan reputasi negara di mata dunia internasional. Negara yang memiliki integrasi nasional yang kuat dianggap lebih stabil dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat menarik investasi dan membangun hubungan diplomasi yang lebih baik dengan negara lain.

4.1.4 Integrasi versus disintegrasi

Integrasi dan disintegrasi merupakan dua konsep yang saling berlawanan. Integrasi menunjukkan upaya untuk menggabungkan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang lebih besar, sementara disintegrasi mengacu pada proses pemecahan atau pemisahan elemen-elemen tersebut. Dalam konteks nasional, integrasi nasional menunjukkan upaya untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa, sementara disintegrasi nasional berarti pecahnya kesatuan nasional menjadi berbagai kelompok yang saling bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Pentingnya integrasi nasional terletak pada kemampuannya untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam suatu negara, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan nasional. Integrasi nasional juga dapat memperkuat identitas nasional dan meminimalkan konflik antarkelompok dalam masyarakat. Di sisi lain,

disintegrasi nasional dapat mengancam kestabilan dan keamanan nasional, serta melemahkan identitas dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi sangat penting untuk membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.



Gambar 13. Potret kesenjangan ekonomi

(Sumber: <https://www.brilio.net>)

4.2 Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Integrasi Nasional

Integrasi nasional menjadi penting karena berbagai sejarah, sosial, dan faktor politik yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional di Indonesia. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi integrasi nasional di Indonesia antara lain:

- Sejarah kolonialisme: Indonesia telah mengalami penjajahan selama lebih dari 300 tahun oleh Belanda, yang memisahkan berbagai

kelompok etnis dan agama dalam koloni. Penjajahan ini mempengaruhi pembentukan identitas nasional dan menyebabkan perpecahan antara berbagai kelompok.

- Keragaman etnis dan agama: Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan beragam kelompok etnis serta agama. Hal ini memperumit integrasi nasional karena berbagai kelompok mempertahankan budaya dan adat istiadat mereka sendiri.
- Konflik politik: Sejarah Indonesia penuh dengan konflik politik dan perpecahan antara berbagai kelompok politik. Konflik ini memperumit upaya integrasi nasional.
- Kesulitan ekonomi: Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak masalah ekonomi, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Kesulitan ekonomi ini dapat memicu ketegangan sosial dan merusak integrasi nasional.
- Untuk mengatasi tantangan integrasi nasional, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional antara lain:
 - Meningkatkan kesadaran nasional: Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang arti penting dari identitas nasional dan integrasi nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan media massa.
 - Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik: Partisipasi aktif dalam kehidupan politik dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada proses politik nasional.
 - Mendorong dialog antar kelompok: Dialog antar kelompok dapat membantu mengatasi perbedaan dan meredakan ketegangan yang ada.

- Mengembangkan program pembangunan ekonomi yang inklusif: Upaya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi dapat membantu meredakan ketegangan sosial dan memperkuat integrasi nasional.

4.2.1 Sejarah Perkembangan Integrasi di Indonesia

Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia diawali pada masa pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Pada saat itu, para tokoh pergerakan nasional menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajahan dan merebut kemerdekaan dari penjajah. Mereka berupaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di antara bangsa Indonesia melalui semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mengajarkan pentingnya persatuan dalam keragaman. Setelah kemerdekaan, negara Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh di tengah perbedaan yang ada. Pemerintah mengambil berbagai upaya untuk membangun integrasi nasional, seperti melalui politik "Nasionalisasi" yang bertujuan untuk membangun kesadaran nasional dan persatuan melalui penggunaan bahasa nasional, simbol-simbol nasional, dan lain sebagainya.

Selain itu, integrasi nasional juga terus dibangun melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah, seperti program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang cinta tanah air dan menghargai perbedaan, serta berbagai kebijakan lainnya seperti kebijakan desentralisasi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan.

4.2.2 Pengembangan Integrasi di Indonesia

Pengembangan integrasi di Indonesia dimulai sejak masa awal kemerdekaan, di mana Pemerintah Indonesia saat itu telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- **Pembentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (1946)**
Kementerian ini bertugas untuk membangun karakter dan semangat nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Salah satu programnya adalah membentuk organisasi kepemudaan yang bersifat nasionalis.
- **Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (1947)**
KNIP dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menetapkan undang-undang sementara dan menyusun naskah konstitusi. KNIP juga bertugas untuk mempersatukan seluruh wilayah Indonesia yang masih terpisah-pisah.
- **Deklarasi Sumpah Pemuda (1928)**
Dalam deklarasi ini, pemuda-pemuda Indonesia bersumpah untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan menghilangkan perbedaan suku, agama, dan ras.
- **Pelaksanaan politik Satu Atap (1959)**
Politik Satu Atap dilaksanakan dalam rangka mempersatukan Indonesia pasca-Peristiwa PRRI/Permesta. Melalui kebijakan ini, seluruh daerah di Indonesia diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Pendirian Perguruan Tinggi Nasional (1960)**
Pemerintah Indonesia mendirikan perguruan tinggi nasional guna memperkuat identitas nasional melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai nasionalisme dan mengurangi pengaruh

budaya asing yang merusak.

- Pembentukan Tim Gabungan Pencipta Lagu Nasional (1984)
Tim ini dibentuk untuk menciptakan lagu-lagu nasional yang mencerminkan semangat dan karakter bangsa Indonesia.
- Pelaksanaan program Pendidikan Nasional (1984)
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan semangat nasionalisme pada generasi muda Indonesia melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai nasional.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat integrasi nasional sebagai fondasi dalam membangun bangsa yang bersatu dan kuat.

4.3 Dinamika Dan Tantangan Integrasi Nasional

Dinamika dan tantangan integrasi nasional dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

- Perbedaan budaya dan agama: Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan agama yang begitu besar. Perbedaan ini dapat menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional karena masing-masing kelompok cenderung mempertahankan kebudayaan dan keagamaan yang mereka anut.
- Perbedaan ekonomi: Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok masyarakat juga dapat memicu ketidakharmonisan dalam integrasi nasional. Kelompok yang merasa diuntungkan akan cenderung mempertahankan keuntungan mereka, sedangkan kelompok yang merasa dirugikan akan merasa tidak adil.
- Perbedaan politik: Persaingan politik antar kelompok dapat

memperkeruh situasi integrasi nasional. Keinginan untuk mempertahankan kekuasaan sering kali menyebabkan konflik dan perselisihan antar kelompok.

- Globalisasi: Dampak dari globalisasi seperti kemajuan teknologi dan arus informasi yang cepat juga dapat mempengaruhi integrasi nasional. Keterbukaan terhadap pengaruh luar dapat memperkaya kehidupan masyarakat, namun juga dapat mempengaruhi identitas nasional dan merusak kebudayaan lokal.
- Konflik sosial: Konflik antar kelompok dalam masyarakat seperti konflik etnis, agama, dan politik dapat memperlemah integrasi nasional.

Dinamika dan tantangan tersebut memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam membangun dan mempertahankan integrasi nasional. Selain itu, juga diperlukan kesadaran dan tekad bersama untuk memajukan bangsa dan menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

4.3.1 Tantangan Pembangunan Integrasi

Beberapa tantangan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia antara lain Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat besar, termasuk perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, dan kepercayaan. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam membangun integrasi nasional karena sulit untuk menciptakan kesatuan yang merata di antara masyarakat yang memiliki perbedaan budaya. Selain itu, terdapat ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Beberapa daerah masih terbelakang dalam hal ekonomi dan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketimpangan ini dapat menjadi sumber konflik dan menghambat terwujudnya integrasi nasional yang merata.

Konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia, seperti konflik agama, ras, dan suku, dapat menjadi hambatan juga bagi integrasi nasional. Konflik sosial tersebut dapat memperkuat sentimen kebangsaan yang sempit dan memperburuk situasi. Kemudian politik identitas yang berkembang di Indonesia dapat memperkuat perbedaan dan menghambat terwujudnya integrasi nasional yang merata. Politik identitas ini dapat memperkuat kelompok-kelompok tertentu dan melemahkan rasa kebangsaan yang lebih luas. Selanjutnya, ketidakadilan sosial, seperti korupsi, nepotisme, dan oligarki, dapat memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan melemahkan rasa kebangsaan. Hal ini dapat menghambat upaya membangun integrasi nasional yang merata dan berkelanjutan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGANEGARA DALAM DEMOKRASI

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara dan warga negara adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang masuk akal, Negara memiliki tanggung jawab terhadap warganya dan sebaliknya (Pratama & Hasan, 2020). Harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara merupakan hal yang sangat penting dalam sistem demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Kedua konsep ini saling terkait dan berkontribusi dalam membangun tatanan demokrasi yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia memberikan hak kepada warga negaranya untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui pemilihan umum dan partisipasi aktif dalam berbagai forum demokrasi lainnya. Dalam hal ini, warga negara memiliki hak untuk memberikan suara, mengemukakan pendapat, mengajukan usulan, dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk memengaruhi pembuatan keputusan publik. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan ruang partisipasi dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Hak yang dimiliki oleh warga negara juga memiliki batasan-batasan tertentu, seperti tidak boleh melanggar hukum, merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan mengancam keamanan dan stabilitas negara. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negaranya serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, harmoni

kewajiban dan hak negara dan warganegara menjadi sangat penting. Negara harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dipenuhi dan dihormati, sedangkan warga negara harus memahami bahwa hak-hak yang dimilikinya juga harus dilandasi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan mengambil bagian aktif dalam membangun dan menjaga negara yang baik. Dengan demikian, harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sehingga keputusan-keputusan publik yang dihasilkan akan lebih terbuka, akuntabel, dan representatif terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

6.1. Konsep Dan Pentingnya Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warganegara

Harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara negara dan warganegara yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Urgensi dari konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan ini. Negara sebagai pihak yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak warganegara serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, warganegara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku serta menunaikan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis.

Dalam sebuah negara yang demokratis, harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara sangat penting karena menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Negara memiliki kewajiban untuk

memenuhi hak-hak warganegara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, warganegara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, membayar pajak, dan terlibat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia, konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara sangat penting untuk mencapai tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warganegara dan memajukan kesejahteraan masyarakat harus sejalan dengan kewajiban warganegara untuk mematuhi aturan hukum dan mengambil bagian dalam proses demokrasi. Hanya dengan harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara yang seimbang, negara dapat mencapai tujuannya dan masyarakat dapat hidup dalam kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

6.2. Sumber Historis dan Sosiologis dan Politis Tentang Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Indonesia

Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi yang muncul pada era revolusi kemerdekaan. Pada saat itu, Indonesia terjajah oleh Belanda dan memerlukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Salah satu prinsip yang diusung dalam perjuangan tersebut adalah demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Setelah kemerdekaan, prinsip demokrasi diadopsi ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Konstitusi yang disusun pada saat itu, yaitu UUD 1945, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib bangsa dan negara. Hal ini tercermin dalam konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara Indonesia.

Selain itu, sumber historis dan sosiologis lainnya yang mempengaruhi

konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah adat istiadat dan budaya Indonesia yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan toleransi. Selama berabad-abad, masyarakat Indonesia hidup dalam beragam suku dan agama, namun tetap mampu menjaga keharmonisan dan persatuan. Pada sisi politik, konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia juga didukung oleh partai politik yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam konteks sejarah, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara untuk memastikan kestabilan politik dan sosial. Konflik dan ketidakharmonisan antara negara dan warga negara dapat menyebabkan ketidakstabilan dan bahkan kerusuhan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara harus terus ditingkatkan. Sumber historis, sosiologis, dan politik di atas memberikan landasan untuk urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Harmoni tersebut sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6.3. Tantangan dan Dinamika Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara

Dalam menjalankan sistem demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, penting untuk menjaga harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warganegara. Namun, terdapat dinamika dan tantangan yang dapat mengganggu harmoni tersebut. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga terjadi penyalahgunaan hak atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan

politik dan sosial juga dapat menghambat harmoni antara negara dan warganegara. Untuk mengatasi dinamika dan tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat edukasi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memperbaiki sistem dan kebijakan yang memperkuat hubungan harmonis antara negara dan warganegara. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memperkuat partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warganegara dapat tercipta dan terjaga dengan baik.

6.3.1. Ketentuan Dasar Pendidikan Dan Kebudayaan Serta IPTEK

Pendidikan dan kebudayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), adalah faktor penting dalam membangun harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, dalam Pasal 32 UUD 1945, diatur bahwa negara wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban manusia. Namun, masih terdapat tantangan dalam membangun harmoni ini, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat kesenjangan antara kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Selain itu, masalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas juga masih menjadi kendala dalam pengembangan IPTEK di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Hal ini dapat

dilakukan melalui perbaikan sistem pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

6.3.2. Aturan Dasar Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Perekonomian Nasional

Aturan dasar tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tantangan dalam membangun harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang merata untuk seluruh warga negara. Selain itu, masalah korupsi dan praktik nepotisme juga menjadi hambatan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan perekonomian yang adil dan merata. Hal ini menghambat pemerataan dan pengembangan sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Negara harus memastikan bahwa aturan-aturan dasar yang terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial dijalankan dengan baik dan tidak ada yang merugikan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memberikan akses yang lebih baik dan adil bagi warga negara untuk mendapatkan kesempatan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

6.3.3. Ketentuan dasar tentang Keamanan Negara dan usaha pertahanan

Aturan dasar tentang usaha pertahanan dan keamanan Negara juga menjadi salah satu tantangan dalam harmoni kewajiban dan hak negara dan

warga negara. Negara Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Tantangan dalam menjaga harmoni antara kewajiban dan hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah terkait dengan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Dalam situasi tertentu, kebijakan pemerintah untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia seperti tindakan represif, diskriminatif, dan penangkapan tanpa proses hukum yang adil.

Oleh karena itu, harmoni antara kewajiban dan hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara harus dijaga dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pemerintah terkait usaha pertahanan dan keamanan negara agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya.

6.3.4. Ketentuan dasar tentang kewajiban dan hak asasi manusia

Aturan dasar tentang hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan dalam harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi dan memiliki hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Namun, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti tindakan diskriminasi, kekerasan, penindasan, dan penganiayaan terhadap kelompok tertentu seperti perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam konstitusi,

implementasi hak asasi manusia masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu terus diperjuangkan untuk mencapai harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara.

Di sisi lain, kewajiban asasi manusia juga menjadi hal penting yang harus dijunjung tinggi. Warganegara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia orang lain dan menjaga keutuhan hak asasi manusia dalam masyarakat. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terjamin dan dilindungi. Oleh karena itu, harmoni antara hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membangun kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

6.4. Pentingnya dan Esensi Harmoni Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara

Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara memiliki esensi dan urgensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Beberapa hal yang menjadi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak tersebut antara lain harmoni kewajiban dan hak memastikan bahwa warga negara tidak hanya memperoleh hak, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Harmoni kewajiban dan hak warga negara menjadi dasar untuk terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis. Hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan hukum, menjadi jaminan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun negara. Harmoni kewajiban dan hak negara dan

warga negara juga dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas antarwarga negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan layanan publik, tetapi juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.

Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara memperkuat peran negara sebagai lembaga yang memerintah dan mengayomi warga negaranya. Negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan menetapkan hukum, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga negara. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat mewujudkan kesepakatan bersama dalam membangun negara yang lebih baik. Warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara menjadi sangat penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, adil, dan demokratis di Indonesia.

BAB VI

DINAMIKA SEJARAH KONSTITUSIONAL, KULTURAL DAN SOSIAL POLITIK

6.1. Pentingnya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Konsep penegakan hukum yang berkeadilan merujuk pada upaya memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konsep ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terletak pada perannya dalam memastikan terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial dapat terancam, korupsi dan kejahatan lainnya dapat merajalela, dan stabilitas negara bisa terganggu.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dalam konteks Indonesia, hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya yang menetapkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan setara bagi seluruh warga negara.

6.2. Perlunya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan karena hal ini merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Tanpa adanya penegakan hukum yang berkeadilan, maka hak asasi manusia dan keadilan sosial tidak dapat terwujud dengan baik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan:

- Mencegah tindakan kriminalitas: Penegakan hukum yang berkeadilan dapat mencegah tindakan kriminalitas di masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, maka pelaku tindak pidana akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal.
- Mendorong kepatuhan terhadap hukum: Penegakan hukum yang berkeadilan dapat mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tegas, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum.
- Menjamin hak asasi manusia: Penegakan hukum yang berkeadilan dapat menjamin hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas pengadilan yang adil.
- Mewujudkan keadilan sosial: Penegakan hukum yang berkeadilan juga dapat mewujudkan keadilan sosial. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu.
- Menjaga stabilitas politik dan sosial: Penegakan hukum yang berkeadilan juga dapat menjaga stabilitas politik dan sosial di masyarakat. Dengan adanya hukum yang adil dan tegas, maka masyarakat akan merasa aman dan tenteram, serta mampu menjaga kestabilan politik dan sosial.

6.3. Sumber Sosiologis, Historis Dan Politik Tentang Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia

Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat dihubungkan dengan sejarah peradaban hukum di Indonesia sejak zaman Hindu-Buddha hingga era modern saat ini. Menurut (Mudana & Dwaja, 2014), pada masa kerajaan Hindu-Buddha, peradaban hukum Indonesia telah mencapai puncaknya dengan lahirnya Kitab Manawa Dharmasastra yang memuat ajaran tentang hukum dan keadilan. Kitab ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan panduan tentang etika dan moralitas. Selain itu, pada masa ini juga terdapat banyak kitab-kitab hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Pada masa Islam, hukum di Indonesia didasarkan pada ajaran agama Islam dan terdapat banyak kitab-kitab hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Pada masa kolonial, sistem hukum di Indonesia diubah menjadi sistem hukum Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum di Indonesia diubah kembali menjadi sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Namun, pemerintah dan masyarakat terus berusaha untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia.

6.3.1. Lembaga Penegakan Hukum

Lembaga penegak hukum di Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiganya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk mengamankan keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menindak tindak kejahatan, serta membantu penegakan hukum. Kejaksaan memiliki

tugas dan wewenang untuk menuntut dalam perkara pidana, memperhatikan pelaksanaan hukum, serta memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah. Pengadilan memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Selain ketiga lembaga tersebut, terdapat juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam pemberantasan korupsi dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

6.3.2. Lembaga Peradilan Pajak

Lembaga Peradilan Pajak (LPP) adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. LPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2003. LPP memiliki tugas dan wewenang untuk memutuskan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). LPP terdiri dari Pengadilan Pajak, Pengadilan Tinggi Pajak, dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Pajak adalah pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang putusan Pengadilan Pajak. MA sebagai pengadilan kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi Pajak yang diajukan banding oleh wajib pajak atau DJP. LPP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, LPP harus bekerja secara independen dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. LPP juga harus memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada hukum dan fakta yang ada dalam perkara, serta harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap tahapan penyelesaian

sengketa perpajakan.

6.4. Tantangan dan Dinamika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia

Dinamika penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga faktor-faktor lain seperti perkembangan teknologi dan globalisasi yang juga dapat mempengaruhi dinamika penegakan hukum di Indonesia. Penting untuk memahami dan mengakui pengaruh dari faktor-faktor ini dalam upaya meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia (Mohtar, 2019; Mukhtori & Rahim, 2020b; Rahayu et al., 2017). Diperlukan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan akses terhadap sistem peradilan, memberantas korupsi dan kolusi, meningkatkan sumber daya, memperkuat perspektif keadilan dalam budaya dan agama, dan menjamin independensi lembaga penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum yang adil, transparan, dan konsisten dalam menegakkan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak individu, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mempromosikan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat dapat mempercayai dan menghormati sistem hukum yang ada, sehingga dapat memperkuat negara hukum dan demokrasi. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan sangatlah penting, karena tanpa penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan mengalami kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan juga dapat membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah serta sistem

hukum yang ada, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA

7.1. Pentingnya Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah konsep yang menggambarkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan geografisnya, baik itu wilayah maupun masyarakatnya (Putri, 2022). Konsep ini menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki identitas yang unik karena letaknya di antara dua benua dan dua samudera, serta sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman budaya yang tinggi. Urgensi dari wawasan nusantara terletak pada pentingnya pemahaman terhadap wilayah dan masyarakat Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. Konsep ini juga menjadi landasan bagi upaya memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, wawasan nusantara juga menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Indonesia dan hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini setidaknya harus disikapi secara memadai dengan memahami pemahaman nusantara agar rasa nasionalisme dapat terekspresikan secara memadai. Memahami pemahaman pulau merupakan salah satu upaya untuk membangun rasa dan sikap nasionalisme di kalangan warga negara Indonesia sebagai dasar untuk menjaga persatuan Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ratih & Najicha, 2021).

7.1.1. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah suatu pandangan, sikap, dan tindakan yang berdasarkan kesadaran tentang kekayaan dan keanekaragaman alam, budaya, serta kearifan lokal di Indonesia. Wawasan Nusantara

mengandung makna bahwa Indonesia memiliki keunikan yang berbeda dari negara lain, termasuk dari segi keanekaragaman alam dan budaya. Pandangan ini juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Dalam wawasan Nusantara, Indonesia dipandang sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak ragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, kesatuan bangsa dan keanekaragaman budaya harus tetap dijaga agar tidak terjadi konflik antarsuku atau antar agama. Selain itu, Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Dalam konteks geopolitik, Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah, serta menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara tetangga dan dunia internasional.

7.1.2. Kebudayaan Daerah Sebagai Kebudayaan Nasional

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan kebudayaan. Sejak masa kemerdekaannya, Indonesia telah mencanangkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mengandung arti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini mencerminkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang harus dihargai dan dijaga. Sejumlah kebudayaan daerah di Indonesia telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Beberapa contoh di antaranya adalah batik, wayang, angklung, tari kecak, dan masih banyak lagi. Keberadaan kebudayaan-kebudayaan daerah ini menjadi kekayaan dan ciri khas bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pengakuan kebudayaan-kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional juga memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. Banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi Indonesia untuk mengenal

kebudayaan-kebudayaan yang ada disini.

7.2. Pentingnya Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memungkinkan kita untuk memahami dan mengembangkan identitas nasional yang unik. Hal ini penting karena identitas nasional yang kuat dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan nusantara juga membantu kita untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, terutama mengingat Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama yang berbeda. Dengan memahami dan menghargai keberagaman ini, kita dapat menjaga harmoni dan mencegah konflik yang dapat mengancam keutuhan negara. Wawasan nusantara juga dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan memahami sumber daya alam dan budaya daerah yang berbeda-beda, kita dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada secara lebih efektif. Wawasan nusantara dapat memperkaya kehidupan budaya bangsa dengan menghargai dan mempelajari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat memperkaya kehidupan sosial, intelektual, dan spiritual kita. Wawasan nusantara juga membantu kita dalam menjaga hubungan dengan negara lain. Indonesia memiliki posisi geopolitik yang strategis dan merupakan negara dengan keanekaragaman etnis dan agama yang kaya. Dengan memahami wawasan nusantara, kita dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain di dunia.

7.3. Sumber Sosiologis, Historis dan Politik Wawasan Nusantara

Sebelum membahas sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa konsep wawasan Nusantara merupakan gagasan yang diusung oleh Presiden Pertama RI,

Soekarno. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 melalui pidato Soekarno dalam peringatan HUT ke-12 Pemuda Indonesia di Bandung. Sumber historis dari wawasan Nusantara dapat ditemukan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu, pengaruh dari kerajaan-kerajaan luar seperti India, China, dan Arab juga mempengaruhi kebudayaan Nusantara dan membentuk identitas bangsa Indonesia.

Sumber sosiologis dari wawasan Nusantara terkait dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Wawasan Nusantara mengakui keberagaman ini sebagai kekayaan dan potensi untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sumber politik dari wawasan Nusantara terkait dengan konsep negara kesatuan dan persatuan Indonesia yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kesatuan negara serta membangun kerja sama antarwilayah dan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Secara umum, sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan Nusantara mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang beragam membutuhkan pandangan yang holistik dan inklusif untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta mencapai tujuan nasional yang lebih besar.

7.4. Tantangan dan Dinamika Wawasan Nusantara

Perubahan tatanan politik global yang cepat dapat memengaruhi pelaksanaan Wawasan Nusantara. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut

agar tidak terkucilkan dan tetap terjaga keutuhan dan keamanan nasional. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang memiliki perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan Wawasan Nusantara karena memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Permasalahan ini dapat mengganggu pelaksanaan Wawasan Nusantara yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Konflik antar daerah yang sering terjadi di Indonesia dapat mengancam keutuhan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dan adil untuk menghindari terjadinya perpecahan dan konflik yang merugikan masyarakat. Ancaman terhadap keamanan nasional seperti terorisme, separatisme, dan penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan stabilitas dan integritas negara. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan Wawasan Nusantara yang mencakup aspek keamanan nasional. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan tersebut, diperlukan kemampuan adaptasi dan penanganan yang tepat untuk menjaga keutuhan dan keamanan nasional serta melaksanakan Wawasan Nusantara dengan baik.

7.5. Urgensi dan Esensi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah suatu pandangan atau konsep tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, yang didasarkan pada kekayaan alam, sumber daya, dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Esensi dari Wawasan Nusantara adalah pentingnya memahami dan memelihara keragaman budaya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya dengan bijaksana untuk kesejahteraan rakyat. Urgensi dari Wawasan Nusantara terletak pada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di

tengah keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, serta memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks globalisasi, Wawasan Nusantara juga menjadi penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam membangun dan memelihara Wawasan Nusantara, seperti perbedaan budaya dan bahasa yang masih menjadi masalah di beberapa daerah, konflik horizontal yang terjadi di beberapa wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam yang masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk membangun kesadaran akan pentingnya Wawasan Nusantara, mengatasi permasalahan yang muncul, serta memperkuat kerja sama antarwilayah dan antarnegara dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

7.5.1. *Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik*

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah esensi dari Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menganut pandangan bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari berbagai pulau yang tersebar, tetapi juga memperhatikan bahwa pulau-pulau tersebut membentuk satu kesatuan politik yang utuh. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan negara, baik itu dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam proses kemerdekaan, para *founding fathers* Indonesia memandang bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dengan wilayah yang terintegrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dilakukanlah proses pembentukan NKRI yang menggabungkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan politik.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terpusat, di mana pusat pemerintahan berada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat persatuan dan kesatuan antarwilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan yang merata. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki urgensi yang sangat penting bagi Indonesia. Jika Indonesia tidak menjaga persatuan dan kesatuan di seluruh wilayahnya, maka akan muncul konflik dan perselisihan yang berpotensi memecah belah bangsa. Oleh karena itu, wawasan nusantara menjadi penting sebagai acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak pada persatuan dan kesatuan Indonesia.

7.5.2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi adalah esensi dari wawasan Nusantara. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah di Indonesia, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam praktiknya, perwujudan kesatuan ekonomi Nusantara telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti program pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia, pengembangan industri, dan promosi investasi. Dengan adanya kesatuan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia serta mendorong kemajuan ekonomi secara nasional.

7.5.3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya adalah esensi dari wawasan nusantara. Kepulauan nusantara terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Wawasan nusantara mengajarkan pentingnya menjaga keragaman tersebut dan membangun persatuan di antara masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Dalam wawasan nusantara, terdapat konsep Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Konsep ini mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia, namun tetap bisa bersatu dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, wawasan nusantara juga mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara kearifan lokal serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia tetap terjaga dan tidak hilang ditelan arus globalisasi yang semakin masif.

7.5.4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah dan perairan yang sangat luas. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan pertahanan nasional menjadi sangat

penting. Konsep Wawasan Nusantara juga memiliki kaitan erat dengan pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konsep ini, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan harus diatur secara terpadu dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Kepulauan Nusantara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut regional. Indonesia terletak di persimpangan jalur pelayaran global dan memiliki banyak sumber daya alam yang kaya. Oleh karena itu, menjaga keamanan laut dan pulau-pulau yang ada menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program-program seperti pembangunan pangkalan militer dan patroli laut untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, terdapat berbagai tantangan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah masalah terorisme, konflik antar etnis, perambahan hutan, dan penyebaran narkoba. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatasi berbagai tantangan ini untuk menjaga keamanan dan pertahanan nasional.

BAB VIII

BELA NEGARA DAN KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional dan bela negara memiliki peran penting dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan di Indonesia. Kedua konsep ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan negara, serta keutuhan wilayah Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Sedangkan bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang memperlihatkan kesediaannya untuk membela negara dan mengorbankan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional dan bela negara menjadi sangat penting mengingat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, agama, dan kebudayaan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara.

Komitmen kolektif kebangsaan yang kuat dapat dibangun dengan memperkuat semangat nasionalisme dan kebangsaan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia, memperkuat lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan negara, serta menggalakkan program-program yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk membangun komitmen kolektif kebangsaan yang kuat. Selain itu, peran media massa juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Secara keseluruhan, ketahanan nasional

dan bela negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan di Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kedua konsep ini, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat bersama-sama menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan negara. Bagi bangsa Indonesia dengan berbagai karakteristik suku, bahasa, dan adat istiadat, perlu adanya pemahaman ketahanan nasional secara komperhensif agar dapat menjaga dan mempertahankan ketahanan nasional dari pengaruh dalam dan luar (Pranowo, 2010).

8.1. Pentingnya Bela Negara Dan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, teritorialnya, dan integritas nasionalnya dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sementara itu, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang senantiasa siap dan mampu membela negara dari ancaman dan gangguan yang mengancam keselamatan dan keutuhan negara. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara sangat penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan ancaman dan gangguan yang bisa datang dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional dan bela negara menjadi dasar dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, sehingga warga negara dapat bersatu dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara.

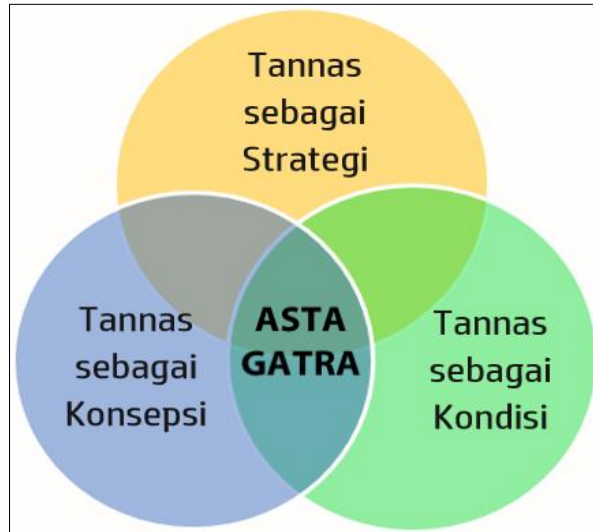
Ketahanan nasional dan bela negara juga memiliki peran penting dalam membangun rasa nasionalisme dan patriotisme di antara warga negara, serta membentuk kepribadian bangsa yang kuat dan bersatu. Melalui ketahanan nasional dan bela negara, warga negara Indonesia diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap negaranya, serta mampu menghadapi

berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Selain itu, ketahanan nasional dan bela negara juga penting dalam membangun citra Indonesia di mata dunia internasional. Dengan memiliki ketahanan nasional dan bela negara yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang dihormati dan diakui oleh negara-negara lain. Hal ini dapat membantu Indonesia dalam menjalankan berbagai kebijakan dan kerja sama internasional yang diarahkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemanusiaan secara global. Namun, tantangan dan dinamika dalam membangun ketahanan nasional dan bela negara tidaklah mudah. Indonesia sebagai negara yang beragam dalam berbagai aspek, seperti agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, masih memiliki potensi konflik dan perbedaan pandangan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus menerus dalam membangun ketahanan nasional dan bela negara, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Menurut (S. K. Rahayu, 2021), untuk mewujudkan Indonesia Emas, generasi milenial harus dibekali, didukung, dibina dan dididik untuk bela negara guna mendukung dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia.

8.1.1. *Wajah Ketahanan Nasional Indonesia*

Wajah ketahanan nasional Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling terkait, seperti keamanan nasional, pertahanan negara, ekonomi nasional, energi dan sumber daya alam, ketahanan pangan, ketahanan sosial dan budaya, serta ketahanan lingkungan hidup. Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting bagi sebuah negara karena merupakan faktor penentu keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam hal ini, bela negara menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga

dan memperkuat ketahanan nasional.



Gambar 16. Tiga Wajah Konsep Ketahanan Nasional

(Sumber: <https://spada.uns.ac.id/>)

8.1.2. *Dimensi dan ketahanan nasional berlapis*

Ketahanan nasional merupakan kondisi suatu negara yang mampu bertahan dan melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman dalam jangka panjang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sedangkan dimensi ketahanan nasional adalah komponen-komponen yang mempengaruhi ketahanan nasional tersebut, seperti ketahanan politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan pertahanan keamanan. Semua dimensi ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Jika satu dimensi terganggu, maka dimensi lainnya juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, upaya membangun ketahanan nasional harus memperhatikan semua dimensi tersebut secara serentak dan terintegrasi.



Gambar 17. Ketahanan Nasional Berdimensi

(Sumber: <http://legowojr.blogspot.com/>)



Gambar 18. Ketahanan Nasional Berlapis

(Sumber: <https://slideplayer.info/slide/13241956/>)

8.2. Pentingnya Bela Negara dan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional dan bela negara merupakan aspek penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, antara lain:

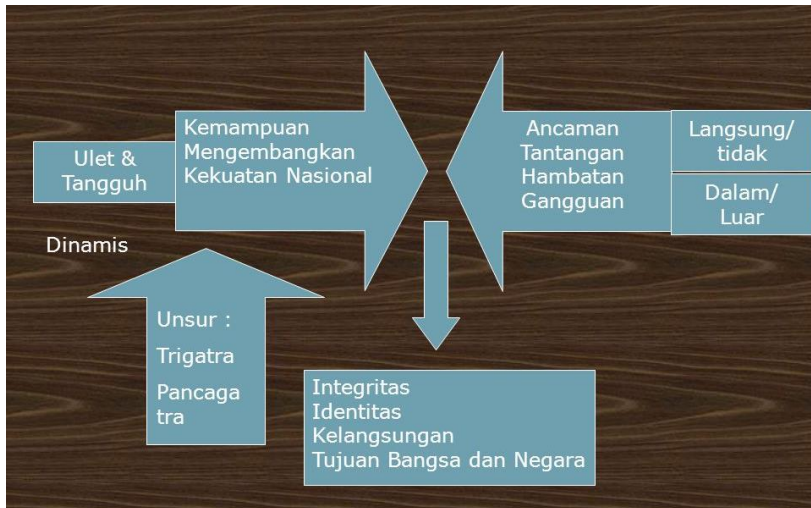
1. Mempertahankan kedaulatan negara: Ketahanan nasional dan bela negara diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman dalam maupun luar negeri. Dengan adanya ketahanan nasional dan bela negara, maka negara akan mampu mengatasi setiap ancaman yang datang dan mempertahankan kedaulatannya.
2. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat: Ketahanan nasional dan bela negara berperan penting dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi yang aman dan stabil, rakyat akan merasa lebih tenang dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
3. Mewujudkan stabilitas politik dan sosial: Ketahanan nasional dan bela negara juga berperan dalam mewujudkan stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Dalam kondisi yang stabil, masyarakat akan merasa aman dan nyaman sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik dan sosial.
4. Menjaga hubungan baik dengan negara lain: Dalam hubungan internasional, ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. Negara yang memiliki ketahanan nasional dan bela negara yang kuat akan lebih dihormati dan diakui oleh negara lain.
5. Meningkatkan potensi pertahanan negara: Ketahanan nasional dan bela negara juga berperan dalam meningkatkan potensi pertahanan negara.

Dalam kondisi yang aman dan stabil, maka negara akan mampu mengembangkan kekuatan pertahanan yang lebih kuat dan tangguh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat, mewujudkan stabilitas politik dan sosial, menjaga hubungan baik dengan negara lain, dan meningkatkan potensi pertahanan negara.

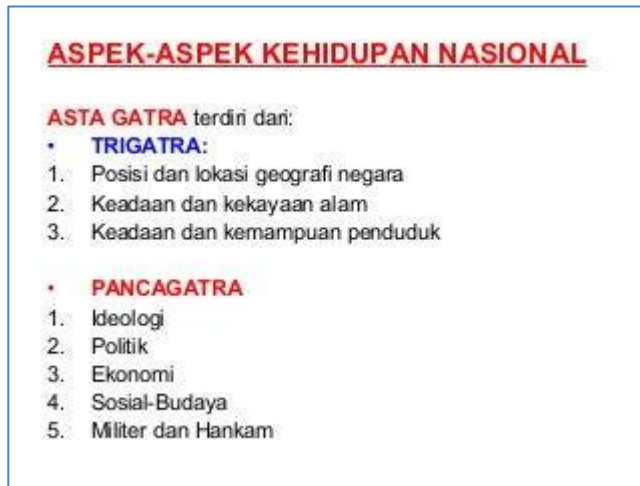
8.2.1. Pentingnya Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan kondisi yang memungkinkan suatu negara untuk dapat mempertahankan keamanan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Esensi dari ketahanan nasional adalah menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, serta mampu membangun kemampuan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ketahanan nasional menjadi penting karena setiap negara memiliki potensi ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan negara dan bangsa. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman dari luar, seperti serangan militer atau terorisme, maupun ancaman dari dalam, seperti konflik sosial atau korupsi. Oleh karena itu, keberadaan ketahanan nasional menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara.



Gambar 19. Konsepsi Ketahanan Nasional
 (Sumber: <https://slideplayer.info/slide/3756948/>)

Sementara itu, bela negara merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Bela negara dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara karena tanpa keduanya, negara tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi ancaman yang datang. Ketahanan nasional dan bela negara menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang muncul baik dari dalam maupun dari luar.



Gambar 20. Aspek-aspek kehidupan nasional

(Sumber: <https://www.slideshare.net/FairNurfachrizi/p-kwn7-ketahanan-nasional>)

8.3. Sumber Historis, Sosiologis dan Politis Bela Negara Dan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional dan bela negara merupakan konsep yang telah hadir sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Konsep tersebut muncul sebagai respons terhadap ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu, seperti ancaman dari dalam negeri oleh pemberontakan dan ancaman dari luar negeri oleh agresi militer dari negara-negara tetangga. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan diwarnai dengan perjuangan melawan penjajahan dan intervensi asing. Pasca kemerdekaan, negara Indonesia harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kalah berat, seperti konflik politik, krisis ekonomi, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman sosial, budaya, dan agama yang memerlukan upaya pemeliharaan dan pengembangan, serta wilayah yang luas dan

kompleks yang memerlukan pengamanan dan pemerataan pembangunan.

Dalam konteks sosial dan politik Indonesia, konsep ketahanan nasional dan bela negara juga berkaitan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keanekaragaman bangsa Indonesia yang bersatu dalam satu kesatuan. Keanekaragaman tersebut harus dijaga dan dipelihara untuk memperkuat ketahanan nasional, namun juga memerlukan kerja sama dan solidaritas untuk membangun komitmen kolektif kebangsaan yang kuat. Dalam perkembangannya, konsep ketahanan nasional dan bela negara juga turut dipengaruhi oleh dinamika global dan regional yang berkembang. Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut, serta menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan global yang terus berkembang. Dalam konteks sejarah, sosial, dan politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber historis, sosiologis, dan politik konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia sangatlah kompleks dan beragam. Hal ini menunjukkan urgensi dan pentingnya upaya pengembangan dan penguatan ketahanan nasional dan bela negara dalam konteks Indonesia.

8.4. Perwujudan Ketahanan Nasional Untuk Bela Negara

Bela Negara adalah sebuah konsep yang menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan serta keamanan negara. Dalam hal ini, bela negara menjadi upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Bela negara di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah dijadikan sebagai kebijakan negara sejak zaman kemerdekaan. Salah satu contoh penerapan bela negara yang terkenal adalah pada masa perjuangan kemerdekaan, di mana seluruh rakyat Indonesia ikut berjuang dan berperan aktif dalam memerdekakan

bangsa ini dari penjajahan. Saat ini, bela negara masih menjadi bagian dari kebijakan negara dalam menjaga ketahanan nasional. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan adanya pelatihan wajib bela negara bagi warga negara Indonesia. Selain itu, bela negara juga mencakup keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan negara dan memperkuat pertahanan serta keamanannya. Dalam konteks globalisasi dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, bela negara menjadi semakin penting sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan nasional. Melalui bela negara, seluruh warga negara Indonesia dapat bersama-sama menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kedaulatan negara, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin timbul di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coupet, S. (2020). *Valuing All Identities Beyond the Schoolhouse Gate: The Case for Inclusivity as a Civic Virtue in K-12*. *Michigan Journal of Gender & Law*, 27.1, 1. <https://doi.org/10.36641/mjgl.27.1.valuing>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Fahmi, R., Aisha Nadya, Nursanda Rizky Adhari, & Zindan Binal Hubi. (2021). JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 33–42. <https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp33-42>
- Hasni, Sapriya, & Erlina Wiyanarti. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Social Studies Sebagai Pembentukan Karakter Cerdas Bagi Generasi Muda Pada Masa Global. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVI(1), 86–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20501>
- Hidayat, O. T., Muhibbin, A., Prasetyo, W. H., Setyadi, Y. B., Yanzi, H., Drupadi, R., Johnstone, J. M. G., & Dewantara, J. A. (2020). Global citizen preparation: Enhancing early childhood education through Indonesian local wisdom. *Universal Journal of Educational Research*, 8(10), 4545–4554. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081023>
- Holimin, H., Dartono, D., & Prihantoro, D. (2021). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara Melalui Pendidikan Bela Negara. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 311–322. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.148>
- Irayanti, I., Umar Yasin, Mila Afrilistiani, & Rizky Nur Indraswari. (2022). Peran Keluarga Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(01), 21–25.
- Irianto, A. M. (2013). Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia. *Humanika*, 18(2), 1–9.
- Jamilus, S. H. , M. H., Endah Kartina, S. Psi. , M. Si., Dr. Rachmat Trijono, S. H. , M. H., Dra. Evy Djuniarti, M. H., Firdaus, S. Sos. , M. H., Muhaimin, S. H., Citra Krisnawaty, S. H. , M. H., Muhammad Fedian, S. I. P., Ester Istyaningrum, S. Sos. , M. S., Ulya FajriAmriyeny, S. H., Jody Imam Rafsanjani, SH., Windi Kumoratih Kusumo Putri, S., & Ade Ruhanda, S.

- I. P. (2021). *Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* (S. E. , M. M. Oki Wahyu Budijanto, Ed.; 1st ed., pp. 1–144). Balitbangkumham Press.
- Jaya, A. A. (2021). *Keputusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Atas Kemenangan Bupati Terpilih Sabu Raijua Yang Terbukti Warga Amerika Serikat*.
- Khoeri, H. M. (2020). *Peran Masyarakat Untuk Bela Negara Dalam Menghadapi Covid 19 (The Role Of The Community To Defend The Country In Dealing With Covid 19)* [Djuanda University]. <https://ssrn.com/abstract=3633778>
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.32669/village>
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(i), 31–37.
- Maftuh, B. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*, II(2), 134–144.
- Mohtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review (JALREV)*, I(1), 68–93.
- Mudana, I. N., & Dwaja, I. G. N. (2014). *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti: Buku Siswa / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mukhtori, M., & Rahim, A. (2020). Kualifikasi Calon Legislatif dalam Sistem Proporsional Terbuka Menurut Pandangan Fiqih Siyasah. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(9), 825–842. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16594>
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Nuryanti, S. (2020). *Peran Masyarakat Untuk Bela Negara Dalam Menghadapi Covid-19* [Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil]. <https://ssrn.com/abstract=3575583>
- Pratama, N. I., & Hasan, S. (2020). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*.
- Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 42(I), 15–20.
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada

- Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 30–43.
- Putri, V. M. (2022). Wawasan Nusantara dalam Pertahanan dan Keamanan. 2022.
- Rahayu, M. P., Tyesta ALW, L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Rahayu, S. K. (2021). Penguatan Kesadaran Bela Negara Pada Remaja Milenial Menuju Indonesia Emas. *Pedagogika*, 12(2), 134–151.
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Jurnal Global Citizen Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Global Citizen*, X(2), 59–64.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....>
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....>
- Ratnasara, S. E. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Raulaelika Fauzan, A., Heldiansyah Ripdia, A., Zahra, A. (2021). Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 1–12.
<http://jurnaldialektika.com>
- Sangkakala, M., Suhardono, E., & Dohamid, A. G. (2020). Peran Rindam Jaya Dalam Meningkatkan Pemahaman Kesadaran Bela Negara Di Kalangan Generasi Muda Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 6(1), 45–64. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/24/>
- Septiano, A. K., & Najicha, F. U. (2022). Upaya Peningkatan Rasa Nasionalisme Dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kepada Generasi Muda Di Era Perkembangan Teknologi. *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, XI(1), 63–66.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Syafar, M. (2017). Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial. *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1–22. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/530>
- Watuwaya, E. R. P. (2021). *Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia*.
- Widiatama, Hadi Mahmud, & Suparwi. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*,

- 3(2), 310–327. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Winataputra, U. S. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013. *Seminar Nasional AP3KNI*, 1–12.
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas. *Al Ahkam*, 14(2), 25–41.